



Indonesia Terkucil? *Safe Travel Corridor* dan Ancaman Deglobalisasi Pasca Pandemi COVID-19

Komisi Hukum, Pertahanan, dan Keamanan PPI Dunia
No. 9 / 2020

*Penulis: Pasha Aulia Muhammad
& Sudharmono Saputra*

2020

WHITE PAPER
PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA
SE-DUNIA (PPI DUNIA)



Ringkasan Eksekutif

- Pandemi COVID-19 adalah suatu kejadian luar biasa. Pandemi ini memiliki efek yang sangat besar, tak terkecuali ke pergerakan internasional antar-negara
- Kebijakan restriksi perjalanan berkaitan dengan Pandemi COVID-19 bisa memiliki efek yang panjang, bahkan setelah pandemi ini telah terkontrol
- Tren penangguhan atau pelemahan kebijakan restriksi perjalanan internasional yang dilakukan oleh berbagai negara ke negara atau wilayah tertentu disinyalir dipengaruhi lebih besar oleh pertimbangan politis daripada pertimbangan ilmiah
- Tren penangguhan atau pelemahan kebijakan restriksi perjalanan internasional yang dilakukan oleh berbagai negara ke negara atau wilayah tertentu bisa memberikan keunggulan komparatif ke negara lain jika dibanding dengan Indonesia
- Tren penangguhan atau pelemahan kebijakan restriksi perjalanan internasional yang dilakukan oleh berbagai negara ke negara atau wilayah tertentu dapat mempercepat akselerasi deglobalisasi dunia
- Penangguhan atau pelemahan kebijakan restriksi perjalanan internasional yang dilakukan oleh berbagai negara ke negara atau wilayah tertentu dapat dijadikan salah satu alat negosiasi internasional oleh negara-negara besar (*Great Powers*)

“Globalisasi seperti yang kita tahu telah berakhir”

- Robin Nibble¹

Latar Belakang

Pandemi Koronavirus (COVID-19) adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Bisa dibilang, pandemi ini adalah suatu kejadian yang bisa dimasukkan ke kategori kejadian angsa hitam (*black swan event*). *Black swan event* adalah jenis kejadian yang memiliki peluang kecil untuk terjadi, akan tetapi efeknya besar.²

¹ He, Yafei. “After the Pandemic: More or Less Anarchy?” *China-US Focus*, Juni 10, 2020. <https://www.chinausfocus.com/foreign-policy/after-the-pandemic-more-or-less-anarchy>.

² Taleb, Nassim Nicholas. *The Black Swan : The Impact of the Highly Improbable*. New York: Random House, 2007. Hal: xvii



Hingga 13 Juli 2020, di seluruh dunia dilaporkan terdapat 22.431.929 kasus COVID-19, termasuk 787.773 kematian.³ Jelas, pandemi ini tidak bisa dianggap remeh. WHO sendiri mengkategorikan pandemi ini sebagai pandemi kelima setelah pandemi Flu 1918.⁴

Cepatnya penyebaran penyakit ini memaksa negara-negara di dunia untuk menerapkan berbagai kebijakan untuk mengontrol penyebaran dan tingkat infeksi penyakit ini di negara mereka masing-masing. Salah satu kebijakan kesehatan publik yang diambil oleh banyak negara adalah pembatasan pergerakan manusia, baik di tingkat internal (di dalam negara itu sendiri) maupun eksternal.

Untuk di tingkat eksternal, salah satu contoh pertama kebijakan pembatasan pergerakan adalah kebijakan Amerika Serikat yang melarang masuknya warga dari daerah atau negara tertentu⁵ dan

kebijakan Indonesia yang melarang hampir semua orang asing dari luar wilayah Indonesia masuk.⁶

Efek dari pembatasan pergerakan yang terjadi secara global ini sangat besar. Prediksi *baseline* Euromonitor Travel Model memprediksi bahwa jumlah dan pertumbuhan perjalanan dunia tahun ini akan jatuh jauh dibawah prediksi sebelum COVID 19.⁷ Jika kita melihat dari situasi di Indonesia secara spesifik, prediksi *baseline* Euromonitor Travel Model memprediksi penurunan kedatangan maupun keberangkatan, baik dilihat dari segi angka maupun dari segi pertumbuhan, jika dibandingkan dengan prediksi sebelum pandemi COVID-19.⁸

³ European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). "Geographical Distribution of 2019-NCov Cases Globally." European Centre for Disease Prevention and Control, 20 Agustus 2020, www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases.

⁴ Liu, Yen-Chin, et al. "COVID-19: The First Documented Coronavirus Pandemic in History." *Biomedical Journal*, Mei 2020, doi:10.1016/j.bj.2020.04.007.

⁵ CDC. "Travelers Prohibited from Entry to the United States." Centers for Disease Control and Prevention, 15 Jun. 2020, www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/from-other-countries.html.

⁶ Gumilang, Arvin. *Siaran Pers Menkumham Terbitkan Larangan Sementara Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Terkait Covid-19*. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, 31 Mar 2020, https://www.imigrasi.go.id/uploads/12-12-56-Pers_Rilis_PERMENKUMHAM_NO__8_TAHUN_2020.pdf

⁷ Euromonitor Travel Model. *Baseline Macro Model*, 2020. May 2020, analytics-dashboards.euromonitor.com/Consulting/Production/Content/MacroIndicatorsModel/Content/MacroScenarioPdf/C19-Baseline.pdf. Passport.

⁸ Ibid.

Efek dari pembatasan pergerakan manusia secara massal ini merupakan hantaman kedua ke stabilitas dan ekonomi global setelah sebelumnya (dan hingga saat ini) dunia harus menghadapi ketegangan antara AS dan Tiongkok. Dengan semakin memanasnya hubungan antara negara-negara besar yang sepertinya tidak berhenti bahkan di tengah sebuah bencana yang bersifat global, muncul banyak pertanyaan mengenai masa depan ekonomi dan politik dunia, khususnya menyangkut kebijakan pergerakan internasional. Seperti apakah kebijakan pergerakan internasional dunia setelah setidaknya penyebaran COVID-19 berhasil terkontrol dan dunia mulai kembali ke normal?

Tujuan

White Paper ini bertujuan untuk mengangkat topik kebijakan restriksi perjalanan dari negara lain dan kebijakan pengangkatan dan/atau pengecualian kebijakan pembatasan perjalanan yang sering disebut juga dengan “*safe travel bubble*” yang menurut kami bisa memiliki efek jauh bahkan setelah pandemi COVID-19 ini dapat terkontrol.

Tren ini menurut hemat kami memunculkan banyak pertanyaan bagi masa depan Indonesia, dikarenakan sifat pemilihan daerah atau wilayah untuk “*safe travel bubble*” yang terkesan lebih politis daripada berdasarkan pertimbangan berbasis kesehatan.^{9 10} Bagaimana efek dari kebijakan ini ke Indonesia? Apakah COVID-19 akan memperkuat tren deglobalisasi yang sudah mulai terjadi dari jaman Pre-COVID 19? Apakah Indonesia dapat mengubah tantangan ini menjadi tangga menuju pintu gerbang Indonesia yang adil dan makmur menuju Indonesia Emas 2045?

Sebagai suatu kejadian *black swan*, COVID-19 akan mengubah banyak hal di dunia. Kita perlu berpikir *out of the box*. Kita tidak bisa berasumsi bahwa dunia setelah pandemi COVID-19 terkendali atau hilang akan sama seperti dunia sebelum pandemi COVID-19, dan kita (atau warga negara lain) akan dapat kembali berpergian ke berbagai wilayah dunia dengan relatif mudah.

⁹ Tasker, Peter. “The New Geopolitics of Travel Bubbles.” *Nikkei Asian Review*, 8 Juli 2020, asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Tea-Leaves/The-new-geopolitics-of-travel-bubbles

¹⁰ Khor, Swee Kheng. “Coronavirus ‘Travel Bubbles’ Must Be Rooted in Science, Not Politics.” *South China Morning Post*, 7 Juli 2020, www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3092045/coronavirus-travel-bubbles-must-be-rooted-science-not-politics.



Kami berharap bahwa *White paper* ini dapat menjadi salah satu pemicu awal diskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan di Indonesia agar Indonesia. Kekacauan yang diakibatkan COVID-19 ini, walau memiliki efek negatif yang banyak dan berat bagi banyak negara, juga bisa menjadi kesempatan emas bagi mereka yang dapat melihat dan memanfaatkan kesempatan yang ada dalam keadaan ini. Mengutip perkataan tokoh fiktional di serial Netflix, *Game of Thrones*, Petyr “Littlefinger Baelish”, “*Chaos isn’t a pit. Chaos is a ladder*” (Kekacauan bukanlah sebuah lubang. Kekacauan adalah sebuah tangga).¹¹

Pergerakan Manusia Antar-Negara dan Globalisasi

“Transportasi udara massal mungkin akan berperan lebih penting dalam takdir dunia daripada bom atom”

-Juan Trippe¹²

Mengapa *White paper* ini berfokus ke pergerakan manusia antar-negara? Apa yang spesial dari pergerakan manusia antar-negara itu? Kenapa kita harus peduli dengan efek jangka menengah dan panjang pembatasan pergerakan manusia antar-negara?

Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, kita perlu mengetahui sedikit gambaran mengenai peran besar pergerakan manusia antar-negara di dunia. Pergerakan manusia antar-negara adalah salah satu faktor yang menggerakkan globalisasi.¹³ Agar kita bisa mendapat gambaran yang baik mengenai hal ini, kita harus memulai dari melihat hubungan antara pergerakan manusia antar-negara dengan gelombang-gelombang globalisasi dan ekonomi dunia.

Pergerakan Manusia Antar-Negara dan Globalisasi: Dua Sisi Mata Uang (?)

Cerita mengenai aturan yang mengontrol pergerakan manusia antar-negara tidak terpisah dari sejarah globalisasi. Bahkan bisa dibilang, setiap ada perubahan signifikan dari peraturan yang

¹¹ HBO. “Game of Thrones - Littlefinger ‘Chaos Is a Ladder.’” YouTube, 6 May 2013, www.youtube.com/watch?v=PxlIraEV8n4&feature=emb_title.

¹² Sampson, Anthony. *Empire of the Sky*. Kutipan diterjemahkan oleh Pasha Aulia Muhammad, A&C Black, 2012.

¹³ Elliott, Anthony, and John Urry. *Mobile lives*. Routledge, 2010.

diterapkan oleh negara-negara soal pergerakan manusia antar-negara dalam dua abad terakhir adalah bagian penting sejarah globalisasi.

Kita disini akan menggunakan definisi bahwa ada dua gelombang globalisasi, yaitu dari periode 1870-1914 (gelombang pertama), dan 1970 sampai sekarang (gelombang kedua). Definisi ini mengikuti definisi yang digunakan Thomas Piketty.¹⁴

1. *Gelombang Pertama Globalisasi (1870-1914)*

Pada abad 19, setelah kalahnya Napoleon dan dimulainya tatanan baru Eropa setelah Kongres Wina (Congress of Vienna) pada 1815, keadaan Eropa mulai stabil dan menjadi relatif damai hingga Perang Dunia Pertama. Kontrol pada pergerakan manusia antar-negara pun mulai melemah.¹⁵

Pada akhir abad ini, kontrol akan pergerakan manusia antar-negara, jika dibandingkan dengan saat sekarang, bisa dibilang sangat minim. Pada tahun 1872 misalnya, Earl Granville, Menlu Inggris kala itu, mengatakan bahwa:

*“Berdasarkan hukum yang ada di Inggris, semua orang asing memiliki hak yang tak terbatas untuk masuk dan bermukim di Inggris.”*¹⁶

Hal ini juga bukan sekedar aspek hukum atau pelaksanaan hukum belaka, tetapi suatu pandangan politik yang didukung dan dipertahankan pada masa itu. Seorang komentator hukum asal Italia, Giovanni Bolis, bahkan mendorong untuk dihapuskannya paspor internasional.¹⁷

¹⁴ Piketty, Thomas, and Arthur Goldhammer. *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge Massachusetts, The Belknap Press Of Harvard University Press, 2014. Hal. 28

¹⁵ Torpey, J. C. (2018) *The Invention of the Passport: Surveillance, Citizenship and the State*. 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Studies in Law and Society). doi: 10.1017/9781108664271. Hal 144-145.

¹⁶ Plender, R. ed., 1988. *International migration law* (Vol. 2). Martinus Nijhoff Publishers. Hal 70

¹⁷ Atti Parlamentari della Camera dei Senatori: Discussioni, Legislatura XXIa, la Sessione 1900–1901. Rome, Forzani e C. Tipografi del Senato, 1901. Hal 922

Efek dari kebijakan ini bisa dilihat dari persentase migran dari penduduk dunia memuncak pada periode antara 1910 sampai 1914. Persentase ini tidak lagi dicapai dunia hingga periode awal 1980an.¹⁸ Kebijakan kontrol pergerakan manusia antar negara yang relatif permisif ini mulai melemah seiring dengan naiknya ketegangan di Eropa dan Perang Dunia Pertama.

Berakhirnya masa kebijakan kontrol pergerakan manusia antar negara yang relatif permisif ini akhirnya terjadi pada akhir 1919, ketika kebijakan AS yang mewajibkan kontrol paspor kepada orang asing yang ingin keluar masuk AS, yang tadinya adalah kebijakan sementara pada masa perang, menjadi kebijakan yang permanen.¹⁹ Setelah Depresi Besar (*Great Depression*) dan memasuki masa menjelang Perang Dunia Kedua, bahkan wilayah yang bergantung kepada perdagangan seperti Singapura dan Malaysia pun membuat kebijakan kontrol imigrasi untuk pertama kalinya.²⁰

2. *Gelombang Kedua (1970 - sekarang)*

Setelah Perang Dunia kedua, era baru dari kebijakan yang mengontrol pergerakan manusia antar-negara dimulai. Pergerakan manusia antar-negara menjadi sebuah hak asasi yang secara eksplisit tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Deklarasi Universal HAM, atau *Universal Declaration of Human Rights, UDHR*) PBB, yaitu pada artikel 13 subartikel 2:

*“Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya”*²¹

Era setelah Perang Dunia Kedua juga merupakan era dari sistem *Bretton Woods*, dimana AS setuju untuk mengamankan perdagangan maritim global. Ini memberi akses kepada negara-negara sekutu AS pada masa Perang Dingin ke pasar dan bahan baku di seluruh dunia.²² Hal

¹⁸ Chdany, Laurence, dan Brian Seidel. "Is Globalization's Second Wave about to Break?." Brookings Institute Global Views 4 (2016).

¹⁹ Torpey, J. C. (2018) "*The Invention of the Passport: ...*". Hal 144-145.

²⁰ Snapshots of globalization's first wave. Dari New York Times Company [database online]. New York, 2014. https://search-proquest-com.libproxy.ucl.ac.uk/docview/2213902210?rft_id=info%3Axi%2Fsid%3Aprim

²¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa. DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA. Terjemah oleh Komnas HAM RI, www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--.

²² Zeihan, Peter. *The Accidental Superpower : The next Generation of American Preeminence and the Coming Global Disorder*. New York: Twelve, 2014. Hal 123

ini berbeda dengan sistem kolonial sebelumnya, dimana negara-negara besar lewat jajahan mereka memiliki akses eksklusif ke wilayah jajahan untuk pasar dan bahan baku.²³

Dengan akses aman ke lautan bebas, maka negara-negara bisa memiliki rantai pasokan yang mendunia dan tidak lokal, yang merupakan ciri khas industrialisasi di gelombang globalisasi kedua ini.²⁴ Hal ini juga mempengaruhi restriksi pergerakan manusia antar-negara, yang tadinya cukup kuat setelah runtuhnya gelombang pertama globalisasi.

Eropa adalah salah satu wilayah pertama yang mulai melunakkan kebijakan restriksi pergerakan manusia antar negara, setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara di Eropa mulai memperlemah restriksi paspor kembali. Pada akhir 1950an di Eropa, Komite Turisme Organisasi Kooperasi Ekonomi Eropa (*Organisation for European Economic Co-operation*) mengatakan bahwa cita-cita menghilangkan paspor itu bukanlah utopia.²⁵

Selama 40 tahun terakhir, jumlah negara yang bisa dikunjungi tanpa memerlukan visa telah naik, walau manfaat dari kebijakan ini lebih dinikmati oleh warga negara dari negara-negara maju.²⁶ Pada zaman ini lah persentase migran dibanding dengan populasi dunia mulai naik kembali ke puncak di zaman gelombang pertama globalisasi.²⁷

Pergerakan Manusia Antar-Negara dan Ekonomi Dunia

Pergerakan manusia antar-negara jelas sangat berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Disini kita akan berfokus pada efek dari pergerakan manusia ke pertumbuhan ekonomi ke tiga sektor, yakni investasi, rantai pasokan (*supply chain*), dan turisme.

Rantai Pasokan (Supply Chain)

Rantai pasokan atau *supply chain* bisa dibilang adalah jaringan pembuluh darah dari ekonomi modern. *AMA Dictionary of Business and Management* sendiri mendefinisikan rantai pasokan

²³ Ibid. Hal 10-11

²⁴ Baldwin, Richard E. "Global supply chains: why they emerged, why they matter, and where they are going." (2012). Hal 19

²⁵ Turack, Daniel C. *The Passport in International Law*. Lexington, Mass. Heath, 1972. Hal 53

²⁶ Mau, Steffen, Fabian Gülzau, Lena Laube, and Natascha Zaun. "The Global Mobility Divide: How Visa Policies Have Evolved over Time." *Journal of Ethnic and Migration Studies* 41, no. 8 (February 9, 2015): 1192–1213. <https://doi.org/10.1080/1369183x.2015.1005007>.

²⁷ Chdany, Laurence, dan Brian Seidel. (2016) *"Is Globalization's Second Wave...."*

sebagai serangkaian tahap yang berhubungan dalam sebuah jaringan suplai yang didalamnya bergerak barang atau jasa.²⁸ Versi pendeknya, bisa dibidang rantai pasokan adalah sebuah sistem yang memproses dan mengirimkan bahan mentah atau input menjadi barang yang kita inginkan ke rumah atau kantor kita.

Globalisasi gelombang kedua telah melebar hingga tersebar ke berbagai negara di dunia, dan tidak lagi terpusat hanya di satu negara dan daerah. Karena ini lah, pergerakan manusia antar-negara mempunyai peranan yang krusial dalam rantai pasokan dunia. Misalnya pergerakan ini, dalam bentuk perjalanan bisnis, membantu untuk menjaga kontrol dari bagian atas perusahaan ke bagian-bagian dan subsider perusahaan di level lebih bawah yang karena globalisasi, bisa terletak berjauhan.²⁹

Selain itu, perjalanan bisnis internasional juga berperan penting untuk menjalin hubungan personal yang penting untuk berjalan mulusnya rantai pasokan global.³⁰ Hal ini bukan saja hal yang didominasi perusahaan multinasional besar, tetapi juga UKM.³¹ Secara lebih spesifik di tingkat menengah dan bawah dalam industri, pergerakan manusia antar negara juga penting demi berjalannya produksi harian dalam industri^{32 33} dan juga rantai transportasi barang.

Nasib dari kru kapal yang terkatung-katung akibat restriksi perjalanan terkait COVID-19 adalah salah satu kekhawatiran besar karena banyak kru kapal tidak bisa turun dari kapal dan berganti kru, yang bisa mengakibatkan naiknya resiko kecelakaan.³⁴ Selain resiko jangka

²⁸ Kurian, George Thomas. "S." Didalam *The AMA Dictionary of Business and Management*, 243-66. New York; Atlanta; Brussels; Chicago; Mexico City; San Francisco; Shanghai; Tokyo; Toronto; Washington, D.C.: AMACOM Division of American Management Association International, 2013.

<http://www.jstor.org/stable/j.ctt1d2dpr2.20>. Hal 265.

²⁹ Millar, Jane, and John Salt. "In whose interests? IT migration in an interconnected world economy." *Population, Space and Place* 13, no. 1 (2007): 41-58. Hal 60

³⁰ Handfield, Robert B., and Ernest L. Nichols. "Key Issues in Global Supply Base Management." *Industrial Marketing Management* 33, no. 1 (January 2004): 29-35. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2003.08.007>.

³¹ Ruzzier, Mitja, Robert D. Hisrich, and Bostjan Antoncic. "SME Internationalization Research: Past, Present, and Future." *Journal of Small Business and Enterprise Development* 13, no. 4 (2006): 476-497.

doi:<http://dx.doi.org.libproxy.ucl.ac.uk/10.1108/14626000610705705>. <https://search-proquest-com.libproxy.ucl.ac.uk/docview/219290516?accountid=14511>.

³² Kailing, Karl. "SEMI Urges Global Standards for Essential Business Travel." SEMI, Juni 3, 2020. <https://blog.semi.org/semi-news/semi-urges-global-clearance-standards-for-essential-business-travel>.

³³ Kilpatrick, Jim, and Lee Barter. "COVID-19: Managing Supply Chain Risk and Disruption." Deloitte.ca, 2020. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/finance/Supply-Chain_POV_EN_FINAL-AODA.pdf. Hal 3

³⁴ Hollinger, Peggy, Robert Wright, and Michael Pooler. "Shipping Industry Warns of Trade Logjam as Crews Remain Stranded." Financial Times, Juni 7, 2020. <https://www.ft.com/content/4f2e33a6-e1f7-407f-b2af-8aac31e0d8ee>.

pendek seperti ini, seperti apakah dunia kedepannya akan terlihat jika tren pembatasan pada pergerakan manusia antar negara terus berlanjut? Apakah proses globalisasi rantai pasokan yang telah menjadi pintu menuju kemakmuran oleh banyak negara akan mulai menutup, atau lebih selektif hanya terbuka untuk negara-negara tertentu saja?

Investasi

Arus investasi asing pada globalisasi gelombang kedua telah naik pesat. Sejak runtuhnya Uni Soviet telah naik pesat, baik jika dihitung dari jumlah uang³⁵ maupun dari persentase investasi dalam PDB.³⁶

Bagi Indonesia, arus investasi asing yang masuk ke Indonesia juga naik pesat semenjak tahun 1998.³⁷ Ekonomi Indonesia pada dekade pertama dan kedua abad 21 pun telah naik pesat, dari PDB lebih kurang USD 400 miliar pada 1999 hingga mencapai USD 1,2 trilyun pada 2019.³⁸ Jelas, investasi yang masuk pesat ke Indonesia adalah salah satu faktor penting dalam naik pesatnya ekonomi Indonesia.

Pergerakan manusia antar-negara adalah salah satu faktor krusial dalam menarik investasi, bahkan bisa memberikan keunggulan komparatif.³⁹ Negara yang mempunyai restriksi pergerakan manusia antar-negara yang tidak ketat, seperti mudah mendapatkan visa untuk masuk dengan negara mitra perdagangan mereka misalnya, menarik investasi asing yang besar.⁴⁰

Salah satu contoh paling menarik soal ini adalah mengenai peran yang dimainkan oleh jaringan diaspora dalam mengundang arus dana ventura (*Venture Capital*) dari AS ke negara-negara

³⁵ The World Bank Group. "Foreign Direct Investment, Net Inflows (BoP, Current US\$) | Data." The World Bank Data, 2019. <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD>.

³⁶ The World Bank Group. "Foreign Direct Investment, Net Inflows (% of GDP) | Data." World Bank Data, 2019. <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS>.

³⁷ The World Bank Group. "Foreign Direct Investment, Net Inflows (BoP, Current US\$) - Indonesia | Data." World Bank Data, 2019. <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=ID>.

³⁸ The World Bank Group. "GDP (Constant 2010 US\$) - Indonesia | Data." The World Bank Data, 2020. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=ID>.

³⁹ Leamer, E. E., and M. Storper. "The Economic Geographic of The Internet Age." *NBER Working Paper* 8450 (2001). Hal 655

⁴⁰ Akman, Engin. "The Facilitating Role of Visa Policies on International Trade and Foreign Direct Investment." *Turkish Studies* 17, no. 4 (September 25, 2016): 712–32. <https://doi.org/10.1080/14683849.2016.1232589>.

seperti India dan Tiongkok,⁴¹ seperti dahulu diaspora ini juga membantu industrialisasi Tiongkok dan India.⁴²

Selain itu, pergerakan manusia antar-negara yang mudah juga mempunyai peranan penting bagi pertukaran dan transfer teknologi ke negara tempat investasi.⁴³ Peran penting yang dimainkan oleh pergerakan manusia antar-negara bahkan disebut sebagai salah alasan kenapa perbedaan pendapatan antar negara.⁴⁴

Globalisasi gelombang kedua telah membantu pertumbuhan ekonomi banyak negara di dunia. Apa hal ini akan berubah setelah pandemi COVID-19 dengan naiknya restriksi, seperti restriksi pergerakan manusia antar-negara?

Turisme

Globalisasi adalah salah satu faktor dalam pertumbuhan pesat turisme di dunia.⁴⁵ Turisme internasional telah naik pesat pada gelombang kedua globalisasi, terlebih lagi semenjak tahun 1990an.⁴⁶ Jumlah kedatangan turis asing di Indonesia semenjak tahun 1990an juga telah naik pesat.⁴⁷ Turisme saat ini adalah 10,3% dari PDB dunia.⁴⁸ Banyak negara di dunia sangat bergantung kepada turisme dalam ekonomi mereka, seperti Filipina dan Thailand misalnya, yang bergantung kepada turisme untuk lebih dari 20% dari PDB mereka.⁴⁹

⁴¹ Madhavan, Ravi, and Akie Iriyama. "Understanding Global Flows of Venture Capital: Human Networks as the 'Carrier Wave' of Globalization." *Journal of International Business Studies* 40, no. 8 (2009): 1241–1259. <https://www.jstor.org/stable/27752445>.

⁴² Saxenian, AnnaLee. "Transnational communities and the evolution of global production networks: the cases of Taiwan, China and India." *Industry and innovation* 9, no. 3 (2002): 183-202.

⁴³ Millar, Jane, and John Salt. "In whose interests? IT migration ..." Hal 55-56

⁴⁴ Hovhannisyian, Nune, and Wolfgang Keller. "International business travel: an engine of innovation?." *Journal of Economic Growth* 20, no. 1 (2015): 75-104.

⁴⁵ Cohen, Erik. "Globalization, global crises and tourism." *Tourism recreation research* 37, no. 2 (2012): 103-111.

⁴⁶ The World Bank Group. "International Tourism, Number of Arrivals | Data." World Bank Data, 2017. <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL>.

⁴⁷ The World Bank Group. "International Tourism, Number of Arrivals - Indonesia | Data." World Bank Data, 2019. <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?locations=ID>.

⁴⁸ World Travel & Tourism Council. "Economic Impact Reports," Juni 8, 2020. <https://wtcc.org/Research/Economic-Impact>.

⁴⁹ Debinski, Gabrielle, and Gabriella Turrissi. "The Graphic Truth: Who Depends the Most on Tourists?" GZERO Media, May 14, 2020. <https://www.gzeromedia.com/the-graphic-truth-who-depends-the-most-on-tourists>.



Apa faktor terbesar yang mendorong seseorang untuk berpergian ke sebuah tempat untuk kebutuhan wisata pada gelombang kedua globalisasi ini? Menariknya, faktor terbesar bukanlah destinasinya, tetapi hambatan yang lebih rendah untuk berwisata, termasuk hambatan visa.⁵⁰

Dalam kasus Indonesia misalnya, kebijakan eksepsi visa (*Visa exception*) juga memiliki efek meningkatkan arus wisatawan ke destinasi wisata yang tidak terlalu terkenal.⁵¹ Dari kasus lain di Hongkong, kebijakan relaksasi visa juga memperlebar kategori pelancong dari Tiongkok yang datang, seperti semakin banyaknya perempuan dan keluarga yang berpergian.⁵²

Jelas, proses globalisasi gelombang kedua ini telah membantu semakin men "demokraskan" turisme internasional, suatu kegiatan yang dahulu hanyalah untuk golongan elit saja. Restriksi perjalanan yang semakin melemah, yang ditunjukkan dari kebijakan eksepsi visa dan kebijakan penangguhan restriksi visa lainnya yang gencar dilakukan pada gelombang kedua globalisasi ini, adalah salah satu faktor penting untuk menarik turis dan meningkatkan turisme internasional. Apa hal ini akan terus berlanjut di dunia setelah Pandemi COVID-19?.

⁵⁰ Chung, Min Gon, Anna Herzberger, Kenneth A. Frank, and Jianguo Liu. "International Tourism Dynamics in a Globalized World: A Social Network Analysis Approach." *Journal of Travel Research* 59, no. 3 (May 16, 2019): 387–403. <https://doi.org/10.1177/0047287519844834>.

⁵¹ Yudhistira, Muhammad Halley, Yusuf Sofiyandi, Witri Indriyani, and Andhika Putra Pratama. "Heterogeneous Effects of Visa Exemption Policy on International Tourist Arrivals: Evidence from Indonesia." *Tourism Economics*, January 10, 2020, 135481661989715. <https://doi.org/10.1177/1354816619897150>.

⁵² Liu, Anyu, and Bob McKercher. "The Impact of Visa Liberalization on Tourist Behaviors—The Case of China Outbound Market Visiting Hong Kong." *Journal of Travel Research* 55, no. 5 (Desember 29, 2014): 603–11. <https://doi.org/10.1177/0047287514564599>.

“Travel Bubble” dan “Travel Corridor”: Asterisk Perjalanan Internasional saat Pandemi COVID-19

“Pandemi ini sepertinya mendorong globalisasi kembali ke tahun-tahun sebelum 1980an...”

-He Yafei⁵³

Belakangan ini santer terdengar istilah “*travel bubble*” dan “*travel corridor*,” tetapi apa sebenarnya makna dari kedua istilah ini?

Nama “*travel bubble*” sendiri berasal dari usulan Selandia Baru untuk membuka perjalanan dengan restriksi dan protokol kesehatan yang lebih ringan dengan Australia,⁵⁴ sementara istilah “*travel corridor*” sendiri walaupun sering digunakan sebagai sinonim dari istilah *travel bubble*, memiliki definisi yang sedikit berbeda, karena juga mencakup satu perjalanan yang mempunyai lebih dari satu destinasi.⁵⁵

Kebijakan *travel bubble* ini bertujuan untuk membolehkan perjalanan internasional ke negara tertentu (bisa hanya untuk keperluan perjalanan tertentu ataupun tanpa batasan) dan sebisa mungkin mengurangi atau menghilangkan kewajiban mengikuti peraturan yang menyulitkan perjalanan antar negara, misalnya karantina wajib dua minggu. Satu hal yang patut diingat adalah memang pengecualian dari restriksi perjalanan sudah diberikan kepada pekerja esensial, tetapi bukan itu maksud dari kebijakan *travel bubble* ini. Bentuk pengangkatan atau pengecualian diluar kategori pekerja esensial yang diberikan oleh berbagai negara lah yang menurut kami masuk kedalam kategori *travel bubble* ini.

Kebijakan ini bukan merupakan kebijakan yang asing di telinga kita, dikarenakan kebijakan yang mirip juga ditempuh oleh pemerintah Indonesia. Misalnya, peraturan Menkumham

⁵³ He, Yafei. (2020). “*After the Pandemic:*”

⁵⁴ FT Editorial Board. “Travel ‘Bubbles’ Offer a Potential Way Forward.” *Financial Times*, 11 May 2020, www.ft.com/content/d82a57d4-9086-11ea-9b25-c36e3584cda8.

⁵⁵ Jordan, Alex. “Coronavirus Travel Bubbles Explained.” *Skyscanner*, 17 Juni 2020, www.skyscanner.com.sg/news/coronavirus-travel-bubbles-explained#what.

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia yang melarang sementara masuknya warga negara asing ke Indonesia mencantumkan beberapa pengecualian, salah satunya adalah pengecualian untuk pekerja pada Proyek Strategis Nasional.⁵⁶

Namun cakupan kebijakan Indonesia yang spesifik hanya mengecualikan pekerja pada Proyek Strategis Nasional dan bukan dengan cakupan lebih luas, misalnya mengecualikan perjalanan resmi atau bisnis secara umum dari suatu negara atau wilayah atau blok ke negara kita atau wilayah tertentu negara kita, menurut hemat kami tidak menjadikan kebijakan ini bisa dikategorikan sama dengan kebijakan *travel bubble* atau *travel corridor* yang diterapkan oleh beberapa negara lain.

Kebijakan pemerintah Indonesia yang bisa dikategorikan kedalam kategori kebijakan *travel bubble* misalnya adalah persetujuan antara pemerintah RI dengan Uni Emirat Arab (UEA)⁵⁷ dan Korea Selatan⁵⁸ untuk membolehkan perjalanan bisnis dan resmi antara kedua negara.

Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat kebijakan pengangkatan dan/atau pengecualian kebijakan pembatasan yang sedang dipertimbangkan atau sudah ditempuh oleh negara lain. Agar terlihat langsung hubungannya dengan Indonesia, maka kita akan melihat kebijakan negara dan blok yang memiliki *impact* besar ekonomi Indonesia, yang didasarkan menurut data negara-negara asal investasi dan wisatawan asing terbesar ke Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik

(BPS) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal ini juga searah dengan arah kebijakan Indonesia sesuai dengan pernyataan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI.⁵⁹

⁵⁶ Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI. Siaran Pers Menkumham Terbitkan Larangan Sementara Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Terkait Covid-19. 31 Mar 2020, https://www.imigrasi.go.id/uploads/12-12-56_Pers_Rilis_PERMENKUMHAM_NO__8_TAHUN_2020.pdf

⁵⁷ Loasana, Nina. "Indonesia Officially Sets up Essential Business 'Travel Corridor' with UAE." *The Jakarta Post*, 31 Juli 2020, www.thejakartapost.com/news/2020/07/31/indonesia-officially-sets-up-essential-business-travel-corridor-with-uae.html

⁵⁸ Fachriansyah, Rizky. "Indonesia to Establish Travel Corridor for 'Essential Business Trips' with South Korea." *The Jakarta Post*, 13 Aug. 2020, www.thejakartapost.com/news/2020/08/13/indonesia-to-establish-travel-corridor-for-essential-business-trips-with-south-korea.html.

⁵⁹ Septiari, Dian. "Doubts Loom over Indonesia's 'travel bubble' plan." *The Jakarta Post*, 18 Juni 2020, www.thejakartapost.com/news/2020/06/17/doubts-loom-over-indonesias-travel-bubble-aim.html.

Berdasarkan definisi ini, maka kita akan mengambil contoh Singapura, Malaysia, Tiongkok (dan Hongkong SAR), Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Uni Eropa.

Singapura

Pemerintah Singapura hingga saat ini masih merekomendasikan kepada rakyatnya untuk tidak berpergian keluar negeri, tetapi perjalanan dibawah kebijakan *Fast Lane* atau *Green Lane* tetap dibolehkan.⁶⁰ Kebijakan “*Fastlane*” adalah persetujuan antara Singapura dan Tiongkok yang membolehkan perjalanan bisnis dari atau ke Singapura dari enam provinsi dan kota di Tiongkok.⁶¹ ⁶² Walaupun begitu, perjalanan dibawah *Fast Lane* sendiri bukanlah perjalanan yang bebas, tetapi dibawah peraturan yang ketat oleh pemerintah Singapura.

Kebijakan yang serupa juga telah disetujui antara pemerintah Singapura dan pemerintah Malaysia.⁶³ Kebijakan yang dinamakan “*Reciprocal Green Lane (RGL)*” dan “*Periodic Commuting Arrangement (PCA)*” ini akan memfasilitasi perjalanan resmi, bisnis, dan kerja diantara kedua negara.

Sama dengan perjanjian Singapura dengan Tiongkok, perjalanan dibawah kategori ini bukan perjalanan bebas.⁶⁴

Pemerintah Singapura sendiri tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan serupa akan diperluas di ASEAN atau bahkan di Asia, akan tetapi tetap mengatakan bahwa negosiasi bilateral dibutuhkan sebelum mencapai tahap itu.⁶⁵

⁶⁰ Ministry of Health Republic of Singapore. *MOH | Updates on COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) Local Situation*. 2020, www.moh.gov.sg/covid-19.

⁶¹ Ministry of Foreign Affairs Singapore, and Ministry of Trade and Industry Singapore. *Joint Press Statement by Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Trade and Industry on the Singapore-China Fast Lane for Essential Travel*. 3 Juni 2020, www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2020/06/20200603-SG-CHINA-Fast-Lane-Essential-Travel.

⁶² Embassy of the People’s Republic of China in the Republic of Singapore. *FAQS ON THE CHINA-SINGAPORE FAST LANE*. 14 Juni 2020, www.chinaembassy.org.sg/eng/lsw/fhqz/t1788677.htm.

⁶³ Ministry of Foreign Affairs, Republic of Singapore, and Ministry of Foreign Affairs, Malaysia. *Joint Press Statement by H.E. Dr. Vivian Balakrishnan, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Singapore and YB Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein, Minister of Foreign Affairs of Malaysia*. 26 Juli 2020, www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2020/07/20200726-Joint-Press-Statement-Causeway-Meeting.

⁶⁴ Tan, Audrey. “Measures for Cross-Border Travel between Singapore and Malaysia Include Minimum 7-Day Stay-Home Notice.” *The Straits Times*, 1 Aug. 2020, www.straitstimes.com/singapore/coronavirus-travel-between-spore-and-malaysia-for-business-or-official-purposes-allowed.

⁶⁵ Wei, Toh Ting. “Regional ‘travel Bubbles’ Likely in Time, Says Lawrence Wong.” *The Straits Times*, 2 Juni 2020, www.straitstimes.com/singapore/health/regional-travel-bubbles-likely-in-time-says-lawrence-wong.

Malaysia

Pemerintah Malaysia masih merekomendasikan kepada rakyatnya untuk tidak berpergian keluar negeri.⁶⁶ Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Singapura telah setuju untuk mempermudah perjalanan resmi dan bisnis diantara kedua negara. Kebijakan yang dinamakan “*Reciprocal Green Lane (RGL)*” dan “*Periodic Commuting Arrangement (PCA)*” ini akan memfasilitasi perjalanan resmi, bisnis, dan kerja diantara kedua negara.⁶⁷

Selain itu, pemerintah Malaysia juga menyatakan membuka perbatasannya untuk turisme medis, tetapi tetap dalam batasan yang ketat.⁶⁸ Pemerintah Malaysia juga mempertimbangkan untuk membuka *safe travel bubble* dengan negara-negara lain atau setidaknya dengan daerah-daerah spesifik di negara lain.⁶⁹

Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok)

Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah melakukan langkah signifikan dengan membolehkan warga negara dari 35 negara Eropa untuk dating ke Tiongkok jika mereka sudah memiliki izin tinggal di Tiongkok.⁷⁰

Sebelumnya, pemerintah Tiongkok juga telah menandatangani perjanjian *Fast Track* dengan pemerintah Korea Selatan, Singapura, Prancis, Inggris, Swiss, Italia dan Jerman.⁷¹ Perjalanan yang dibolehkan dibawah perjanjian *Fast Track* ini hanyalah perjalanan esensial dalam sektor bisnis, logistik, produksi dan jasa teknis dan, untuk ke Tiongkok, hanya untuk 10 kota dan

⁶⁶ “PKPP: Keluar Masuk Negara Masih Tidak Dibenarkan Kecuali Dengan Kebenaran & SOP Ketat.” *Buletin TV3*, 11 Aug. 2020, www.buletintv3.my/video/nasional/pkpp-keluar-masuk-negara-masih-tidak-dibenarkan-kecuali-dengan-kebenaran-and-sop-ketat.

⁶⁷ Menon, Vanu Gopala. “Usaha Kolektif Singapura, Malaysia Capai Hasil Positif.” *BH Online*, 10 Aug. 2020, www.bharian.com.my/kolumnis/2020/08/719628/usaha-kolektif-singapura-malaysia-capai-hasil-positif.

⁶⁸ Valentina, Jessicha. “Malaysia Reopens Borders Partially to Medical Travelers.” *Travel Guide by the Jakarta Post*, 21 Juli 2020, www.thejakartapost.com/travel/2020/07/21/malaysia-reopens-borders-partially-to-medical-travelers.html.

⁶⁹ Bernama. “Tourism Minister: Malaysia Mulling Travel Bubbles with Covid-19-Free Regions.” *Malay Mail*, 24 Juli 2020, www.malaymail.com/news/malaysia/2020/07/24/tourism-minister-malaysia-mulls-implementing-travel-bubbles-with-green-stat/1887824.

⁷⁰ Embassy of the People’s Republic of China in the Kingdom of Denmark. 关于为持中国有效居留许可的相关外国人提供签证便利的通知 (*Pemberitahuan Tentang Penyediaan Fasilitas Visa Bagi Orang Asing Yang Memegang Izin Tinggal Yang Sah Di Tiongkok*). 10 Aug. 2020, dk.chineseembassy.org/chn/lsw/t1805270.htm.

⁷¹ Jing, Li Hua, et al. “Select Foreign Nationals Are Green-Lighted for Fast-Track Channels to Return to China for Work Purposes: Koreans, Japanese, Singaporeans, Germans, French, British, Swiss and Italians Are Now Eligible.” *The Square*, Horizons Corporate Advisory, 5 Juni 2020, www.thesquare.blog/2020/06/05/select-foreign-nationals-are-green-lighted-for-fast-track-channels-to-return-to-china-for-work-purposes-koreans-japanese-singaporeans-germans-french-british-swiss-and-italians-are-now-eligible/.

provinsi di Tiongkok.^{72 73} Walaupun begitu, daftar kota dan provinsi sekarang sepertinya telah naik menjadi 11 kota dan provinsi.⁷⁴

Ada satu sumber yang menyatakan bahwa perjalanan dibawah kebijakan *Fast Track* ini sendiri dibatasi hanya untuk beberapa jabatan dalam suatu perusahaan,⁷⁵ tetapi ini tetap masih belum jelas. Sumber lain misalnya hanya menyebutkan pekerja esensial.⁷⁶

Walaupun demikian, *charter* pesawat pertama dari Jerman di bawah kebijakan ini memang berisi eksekutif perusahaan.⁷⁷ Pemerintah Tiongkok melihat aplikasi berdasarkan asas per kasus (*case by case*), dan implementasi dari kebijakan ini kadang berbeda tergantung dengan daerah.⁷⁸

Kebijakan serupa *Fast Track*, yang dinamai *Fast Lane*, juga sudah ditandatangani antara pemerintah RRT dengan pemerintah Kamboja.⁷⁹ Pemerintah RRT juga telah menunjukkan kesediaannya untuk memperlebar akses ke *Fast Track* ke negara-negara lain.⁸⁰

⁷² Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China. *Foreign Ministry Spokesperson Geng Shuang's Regular Press Conference on April 30, 2020*. 30 Apr. 2020, www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1775332.shtml.

⁷³ Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea. *Fast Track Procedure Available for Applicable Koreans Entering China for Business Purpose*. 1 May 2020, www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=321072.

⁷⁴ Ligorner, K Lesli, and Shannon A. Donnelly. "Potential Routes for US Employees to Enter China for Work Purposes." *Morgan Lewis*, 10 Juli 2020, www.morganlewis.com/pubs/potential-routes-for-us-employees-to-enter-china-for-work-purposes-cv19-lf.

⁷⁵ Jing, Li Hua, et al. "Select Foreign Nationals Are Green-Lighted..."

⁷⁶ Fu, Helei. "Clarification of Entry Measures for Foreign Employees into Shanghai During the Travel Ban (Normal and Fast Track Channels)." *European Union Chamber of Commerce in China*, 23 May 2020, www.europeanchamber.com.cn/en/national-news/3224/clarification_of_entry_measures_for_foreign_employees_into_shanghai_during_the_travel_ban_normal_and_fast_track_channels_.

⁷⁷ Simon, Frank, and Andreas Buerger. "'Business Is Restarting': German Executives Fly Back to China." *Reuters*, 29 May 2020, www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-china/business-is-restarting-german-executives-fly-back-to-china-idUSKBN2352TF.

⁷⁸ Wiendieck, Sebastian, and Peter Stark. "Specific Entry Possibilities during Entry Ban to China." *Rödl & Partner*, 10 Juni 2020, www.roedl.com/insights/covid-19/corona-china-specific-entry-possibilities-during-entry-ban.

⁷⁹ Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China. *China and Cambodia Hold the Fifth Meeting of Intergovernmental Coordination Committee*. 16 Juni 2020, www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1789723.shtml.

⁸⁰ Woo, Ryan, and Lusha Zhang. "China Will Continue Pushing for 'fast-Track' Entry Arrangement with Other Countries." *Reuters*, 7 Juni 2020, www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-fastrack/china-will-continue-pushing-for-fast-track-entry-arrangement-with-other-countries-idUSKBN23E04R.

Daerah Administrasi Istimewa Hongkong (Hongkong Special Administrative Region (SAR))

Pemerintah Hongkong SAR hingga kini masih belum mempunyai kebijakan sejenis *Travel Bubble*, *Fast Track*, ataupun *Travel Corridor* dengan wilayah atau negara manapun selain Makau,

Daratan Utama Tiongkok (*Mainland China*) selain Provinsi Hubei, ataupun Taiwan.⁸¹ Hongkong sempat akan masuk dalam kebijakan *Travel Bubble* Thailand, namun kebijakan ini dibatalkan oleh Thailand setelah kasus harian COVID-19 kembali naik di beberapa negara Asia yang menjadi peserta awal kebijakan ini.⁸²

Jepang

Pemerintah Jepang masih merekomendasikan kepada rakyatnya untuk tidak berpergian keluar negeri,⁸³ dan secara eksplisit melarang orang yang pernah berkunjung dalam 14 hari terakhir ke Indonesia untuk masuk ke Jepang.⁸⁴

Pemerintah Jepang saat ini telah memulai membuka kembali akses perjalanan bisnis dengan Thailand dan Vietnam.⁸⁵ Perjalanan bisnis yang diizinkan juga bukan perjalanan yang bebas, melainkan harus mengikuti ketentuan ketat dari pemerintah Jepang.⁸⁶

Korea Selatan

Pemerintah Korea Selatan sejauh ini sudah memiliki perjanjian *Travel Corridor* dengan dua negara lain, yaitu dengan Tiongkok dan Indonesia. Perjanjian dengan Tiongkok sendiri adalah *Fast Track* antara Korea Selatan dan 10 kota dan provinsi di Tiongkok pada saat keputusan ini

⁸¹ The Government of the Hongkong Special Administrative Region. *Points to Note for Quarantine for Inbound Travellers*. 2020, www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html. Diakses pada 13 Aug. 2020.

⁸² Reuters. "Tourism-Reliant Thailand Shelves 'Travel Bubble' as Virus Cases Rise." *The Japan Times*, 6 Aug. 2020, www.japantimes.co.jp/news/2020/08/06/asia-pacific/thailand-shelves-travel-bubble/.

⁸³ Ministry of Foreign Affairs of Japan. 新型コロナウイルスの感染拡大を受けての出国制限措置や航空便の運休による出国困難) (新規) (Pembatasan keberangkatan akibat penyebaran infeksi virus corona baru dan kesulitan keberangkatan akibat penanggulangan penerbangan (baru)). 25 Mar. 2020, www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0325.html.

⁸⁴ Japan National Tourism Organization. "Coronavirus (COVID-19) Advisory Information." Agustus 22, 2020. <https://www.japan.travel/en/coronavirus/>.

⁸⁵ Miyahara, Yuichi, et al. "Japan – Phased Resumption of Cross-Border Travel with Thailand and Vietnam - KPMG Global." *KPMG*, 6 Aug. 2020, home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/08/flash-alert-2020-341.html.

⁸⁶ Ibid.

diumumkan,⁸⁷ walau sepertinya daftar kota dan provinsi di Tiongkok ini sudah dinaikkan ke 11 kota dan Provinsi.⁸⁸ Perjalanan yang dibolehkan dibawah perjanjian *Fast Track* ini hanyalah perjalanan esensial dalam sektor bisnis, logistik, produksi dan jasa teknis.⁸⁹

Perjanjian dengan Indonesia sendiri bernama “*Travel Corridor*,” dan mengizinkan perjalanan bisnis dan diplomatik dari kedua negara ke satu sama lain.⁹⁰ Teknis *travel corridor* Korea Selatan dengan Indonesia sendiri memiliki perbedaan dengan perjanjian yang sama yang dimiliki

Korea Selatan dengan Tiongkok. Misalnya, syarat epidemiologis yang perlu diikuti dan tidak adanya pembatasan hanya wilayah tertentu yang bisa dikunjungi baik di Indonesia maupun di Korea Selatan.^{91 92}

Inggris

Pemerintah Inggris hingga saat ini masih merekomendasikan kepada warganya untuk tidak melakukan perjalanan internasional, namun, pemerintah Inggris menanggapi rekomendasi ini ke beberapa negara dan wilayah di dunia.⁹³

Penangguhan rekomendasi ini tidak seperti negara lain di daftar ini yang membatasi perjalanan yang dibolehkan untuk keperluan penting tertentu (misal, perjalanan bisnis atau resmi), tetapi juga untuk keperluan perjalanan non-esensial, bahkan wisata.⁹⁴

Sampai saat ini, hanya ada 22 negara di Asia yang masuk kedalam “travel bubble”nya Inggris, dimana pemerintah Inggris tidak memberikan rekomendasi dilarang pergi. Diantara negara anggota ASEAN, baru tujuh negara yang masuk daftar ini, yakni Brunei, Kamboja, Laos,

⁸⁷ Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea. “*Fast Track Procedure Available...*”

⁸⁸ Ligorner, K Lesli, and Shannon A. Donnelly. “*Potential Routes for US Employees...*”

⁸⁹ Ministry of Foreign Affairs, the People’s Republic of China. “*Foreign Ministry Spokesperson Geng Shuang’s...*”

⁹⁰ Fachriansyah, Rizky. “*Indonesia to Establish Travel Corridor...*”

⁹¹ Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea. “*Fast Track Procedure Available...*”

⁹² Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea. *ROK’s Essential Economic Personnel, Including Business People, to Be Allowed into Indonesia*. 13 Aug. 2020, www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=321187

⁹³ Foreign and Commonwealth Office. “*Foreign Travel Advice*.” *GOV.UK*, 2020, www.gov.uk/foreign-travel-advice. Diakses pada 11 Aug. 2020.

⁹⁴ Pickard, Jim, and Tanya Powley. “*Plan for Travel Corridors with Europe to be given Priority*.” *Financial Times*, 24 Juni 2020, www.ft.com/content/a69af2c2-5b0c-4354-be6c-74fa0acab4a9.



Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.⁹⁵ Perjalanan ke Indonesia untuk warga negara Inggris sendiri masih direkomendasikan untuk tidak dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Inggris.⁹⁶

Uni Eropa

Dewan Uni Eropa (*Council of the European Union*) telah mengeluarkan list negara-negara yang direkomendasikan untuk diangkat dari aturan pembatasan masuk ke Uni Eropa dan negara-negara area Schengen. Dari list negara-negara yang ada di daftar, negara Asia yang masuk hanya Tiongkok (tergantung apakah pemerintah Tiongkok mengizinkan warga Uni Eropa masuk atau tidak), Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.⁹⁷

⁹⁵ Foreign and Commonwealth Office. "Coronavirus (COVID-19): Countries and Territories Exempt from Advice against 'All but Essential' International Travel." *GOV.UK*, 6 Aug. 2020, www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-countries-and-territories-exempt-from-advice-against-all-but-essential-international-travel.

⁹⁶ Foreign and Commonwealth Office. "Indonesia Travel Advice." *GOV.UK*, Juli 30, 2020. <https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/indonesia>.

⁹⁷ Council of the European Union. "Council Recommendation (EU) 2020/1144 of 30 Juli 2020 Amending Recommendation (EU) 2020/912 on the Temporary Restriction on Non-Essential Travel into the EU and the Possible Lifting of Such Restriction ST/9978/2020/INIT." *EUR-Lex*, 30 Juli 2020, eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.248.01.0026.01.ENG&toc=OJ:L:2020:248:TOC#ntr.

Setelah COVID-19: Tatanan Dunia Baru?

“Saya telah hidup melewati tiga setengah pandemi. Yang pertama adalah pandemi geopolitik bernama 9/11. Yang kedua adalah pandemi keuangan yang bernama 2008. Yang ketiga adalah pandemi epidemiologis yang bernama coronavirus. Dan yang setengah, yang akan datang, yang paling berat dari semuanya, adalah perubahan iklim”

- Thomas Friedman⁹⁸

Seperti apakah dunia setelah pandemi COVID-19? Hal ini adalah pertanyaan yang ada di pikiran banyak pihak, terutama sekali seperti apakah masa depan tatanan dunia (apakah akan tetap berdasar tatanan dunia berbasis aturan atau akan diganti dengan sesuatu yang berbeda, dan peran AS, Rusia, Uni Eropa, dan Tiongkok di dalamnya.^{99 100 101 102} Masa depan pergerakan manusia antar-negara juga termasuk hal yang diperdebatkan.¹⁰³

Ada tiga tren dunia yang menurut kami akan mempengaruhi perubahan kebijakan pasca pandemi COVID-19, yaitu:

1. Kebijakan restriksi perjalanan ke beberapa wilayah atau negara ke level yang sangat tinggi

Kebijakan relaksasi *travel restrictions* saat ini lebih sarat nuansa politis di banding sains¹⁰⁴, dan bahkan berbau persaingan keras antar negara besar dan negara adikuasa (superpower) di dunia.¹⁰⁵ Hal ini mungkin diperkeruh dengan belum adanya konsensus mengenai dasar ilmu mengenai relaksasi pembatasan ini. WHO memperingatkan bahwa tidak ada strategi yang

⁹⁸ ThePrint. “Off The Cuff with Thomas Friedman.” Video Youtube. *YouTube*, Mei 11, 2020.

<https://www.youtube.com/watch?v=KkwRieeP9gE>.

⁹⁹ Rausch, Thomas. “What If the Covid19 World Is What States Make of It?” GED-Project, April 16, 2020.

<https://ged-project.de/globalization/what-if-the-covid19-world-is-what-states-make-of-it/>.

¹⁰⁰ Lo, Bobo. “Global Order in the Shadow of the Coronavirus: China, Russia and the West.”

www.lowyinstitute.org, Juli 29, 2020. <https://www.lowyinstitute.org/publications/global-order-shadow-coronavirus-china-russia-and-west>.

¹⁰¹ Campbell, Kurt M., and Rush Doshi. “The Coronavirus Could Reshape Global Order.” *Foreign Affairs*, Maret 20, 2020. <https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-03-18/coronavirus-could-reshape-global-order>.

¹⁰² Brannen, Samuel, Kathleen H. Hicks, Seth G. Jones, Rebecca Hersman, and Todd Harrison. “World Order after Covid-19.” CSIS, May 28, 2020. <https://www.csis.org/analysis/world-order-after-covid-19>.

¹⁰³ Barabanov, Oleg. “Will Global Mobility Recover After the Pandemic?” Valdai Club, Juni 18, 2020.

<https://valdaiclub.com/a/highlights/will-global-mobility-recover-after-the-pandemic/>.

¹⁰⁴ Khor, Swee Kheng. (2020). “*Coronavirus ‘Travel Bubbles’*”

¹⁰⁵ Tasker, Peter. (2020). “*The New Geopolitics of Travel Bubbles.*”

beresiko rendah jika kita ingin membuka kembali perjalanan internasional, dan meminta agar hanya perjalanan esensial darurat yang diutamakan.

Yang jelas, tidak adanya konsensus internasional mengenai apa syarat untuk memasukkan atau mengeluarkan sebuah daerah ke daftar yang dikenakan restriksi perjalanan atau tidak. Ada kemungkinan misalnya bahwa hal ini akan menyebabkan munculnya apa yang disebut oleh Danny Quah sebagai “pasar bagi regulasi global”¹⁰⁶, dimana negara-negara besar dunia berebut untuk menulis peraturan mengenai hal ini dan negara-negara lain menjadi penentu peraturan mana yang diadopsi sebagai standar di region (seperti misal, di Asia) atau bahkan di dunia secara umumnya.

Faktor pembatasan pergerakan manusia antar-negara yang diakibatkan pandemic COVID-19 ini terjadi ketika sentimen pengontrolan perbatasan sudah naik sebelumnya dan menjadi topik politik yang kuat. Tidak menutup kemungkinan bahwa restriksi perjalanan yang tadinya awalnya merupakan kebijakan sementara, pada akhirnya menjadi kebijakan yang mempengaruhi kebijakan restriksi perjalanan antar-negara secara jangka panjang seperti perubahan kebijakan imigrasi setelah serangan teroris 9/11. Dalam skenario terburuk bahkan permanen, seperti kebijakan visa di AS yang tadinya merupakan kebijakan darurat dalam menghadapi Perang Dunia Pertama.¹⁰⁷

Kita akan membahas dua skenario kemungkinan bagaimana pergerakan manusia antar-negara akan terlihat di masa depan, *skenario Post-9/11* dan *skenario 1919*:

Skenario Post-9/11

Skenario Post-9/11 membayangkan skenario masa depan dimana seperangkat aturan dan kebiasaan yang mengatur pergerakan manusia secara global diikuti oleh praktis semua negara. Aturan yang mengatur pergerakan manusia antar-negara dan keamanan semakin menegat, dengan restriksi ke beberapa wilayah yang bersifat temporer dan bisa dikenakan dan dicabut dengan mudah, dengan arus globalisasi yang melambat jika dibandingkan dengan masa sebelum COVID-19.

¹⁰⁶ Quah, Danny. “Great Power Competition in the Marketplace for World Order (Draft),” November 14, 2019. <http://www.dannyquah.com/Quilled/Output/Quah-D-2019-Great-Power-Competition-Marketplace-World-Order.pdf>.

¹⁰⁷ Torpey, J. C. (2018) “*The Invention of the Passport: ...*”. Hal 144-145.



Sebelum kita lanjut membahas tentang ini, kita perlu mengetahui seperti apa perubahan pada aturan pergerakan manusia antar-negara setelah 9/11. Serangan teroris 9/11 mengubah banyak hal, termasuk mengenai kebijakan yang mengatur pergerakan manusia antar-negara.¹⁰⁸ Undang-Undang Patriot (*Patriot Act*) AS yang disahkan tidak lama setelah serangan terror ini mempunyai beberapa artikel yang memperkuat kebijakan kontrol imigrasi dan bahkan memandatkan pemerintah AS untuk membuat teknologi paspor yang bisa dibaca mesin¹⁰⁹, yang sekarang lebih dikenal dengan E-Passport.

Selain itu, untuk keperluan melawan terorisme, data yang dikumpulkan oleh negara-negara mengenai orang yang bergerak antar-negara juga meningkat drastis. Kebijakan ini didukung secara internasional, ditunjukkan dengan diloloskannya Resolusi Dewan Keamanan PBB pada Desember 2017 secara aklamasi yang meminta negara-negara mengumpulkan salah satunya informasi mengenai penumpang pesawat, disamping informasi lebih spesifik lainnya mengenai orang dibawah pantauan dan teroris.¹¹⁰

Laporan Komisi 9/11 (*9/11 Commission Report*) juga memiliki satu bagian penuh berisi tentang rekomendasi kebijakan imigrasi dan “pembatasan pergerakan teroris.”¹¹¹ Proses aplikasi visa ke AS pun dirombak total, dan kewajiban dokumentasi bagi aplikasi visa juga meningkat. Entah disengaja atau tidak, tetapi visa non-imigran yang diberikan oleh AS ke warga negara dari negara seperti Arab Saudi, Pakistan, dan Yaman pun turun, dan angka tahunan visa yang diberikan selalu berada di angka di bawah angka visa non-imigran pada tahun 2001.¹¹²

¹⁰⁸ Torpey, J. C. (2018). “*The Invention of the Passport...*” Hal.

¹⁰⁹ 107th US Congress. “UNITING AND STRENGTHENING AMERICA BY PROVIDING APPROPRIATE TOOLS REQUIRED TO INTERCEPT AND OBSTRUCT TERRORISM (USA PATRIOT ACT) ACT OF 2001.” Washington: US Government Publishing Office, 2001.

<https://www.congress.gov/107/plaws/publ56/PLAW-107publ56.pdf>.

¹¹⁰ Schmitt, Eric. “Defeated in Syria, ISIS Fighters Held in Camps Still Pose a Threat.” *The New York Times*, January 24, 2018, sec. World. <https://www.nytimes.com/2018/01/24/world/middleeast/isis-syria-militants-kurds.html>.

¹¹¹ Kean, Thomas H., Lee H. Hamilton, Richard Ben-Veniste, Bob Kerrey, Fredd F. Fielding, John F. Lehman, Jamie S. Gorelick, et al. “The 9/11 Commission Report.” Washington: National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, Juli 22, 2004. <https://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf>. Hal 383-389

¹¹² Riley, K. Jack. “Flight of Fancy?: Air Passenger Security Since 9/11.” Di *The Long Shadow of 9/11: America's Response to Terrorism*, Diedit oleh Jenkins Brian Michael and Godges John Paul, by Dobbins James, Muñoz Arturo, Jones Seth G., Wehrey Frederic, Rabasa Angel, Larson Eric V., Paul Christopher, Cragin Kim, Helmus Todd C., Jackson Brian A., Treverton Gregory F., Ringel Jeanne S., Wasserman Jeffrey, Dixon Lloyd, Kipperman Fred, and Reville Robert T., 147-60. Santa Monica; Arlington; Pittsburgh: RAND Corporation, 2011.

Bukan hanya informasi yang dikumpulkan meningkat atau administrasi dokumen yang diperlukan untuk berpergian yang semakin meningkat. Dikarekan terorisme ini bukan kejadian yang hanya terjadi sekali, walau jumlah serangan terorisme terus berkurang, baik dilihat secara umum atau secara spesifik di daerah tertentu,¹¹³ ancaman serangan terorisme tidak pernah benar-benar hilang. Karena itu, salah satu hal lain yang mulai sering dikeluarkan pada zaman Post-9/11 adalah penerapan travel warning oleh beberapa negara maju ke negara yang terkena serangan terorisme.

Setelah serangan terorisme di Indonesia misalnya, beberapa negara sering kali memberi travel warning bagi warganya untuk tidak berpergian ke Indonesia.¹¹⁴ Jika skenario ini adalah skenario yang akan menjadi model bagi “normal baru” setelah masa pandemi COVID-19, maka ada kemungkinan seperti inilah keadaannya:

I. Semakin banyaknya dokumen administratif yang diperlukan untuk masuk ke sebuah negara.

Dokumen pelengkap untuk berpergian mungkin akan semakin banyak, seperti misalnya dokumen keterangan negatif hasil swab atau dokumen yang menunjukkan pernah dimana saja dalam suatu periode atau mungkin sertifikat vaksinasi vanksin COVID-19 jika vaksin sudah ditemukan dan diproduksi massal. Hal ini jelas akan meningkatkan tingkat kerumitan untuk berpergian dari satu negara ke negara lainnya.

II. Semakin banyaknya data yang dikumpulkan dari orang yang ingin berpergian melintas antar-negara.

Jika pada era post-9/11 negara-negara mengumpulkan data mengenai suspek teroris dan teroris, dan data biometris, maka pada era post COVID-19 negara-negara mulai meningkatkan upaya *contact tracing* mereka dengan lebih instrusif dan berkerjasama dengan satu sama lain. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan mengumpulkan data untuk memastikan agar mereka mematuhi misalnya kebijakan karantina mandiri dan tidak

¹¹³ Institute for Economics & Peace. “Global Terrorism Index 2019 Measuring the Impact of Terrorism.” Sydney, 2019. <http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/11/GTI-2019web.pdf>. Hal 4

¹¹⁴ The Jakarta Post News Desk. “12 Countries Issue Travel Advisories Following Terrorist Attacks.” The Jakarta Post, Mei 16, 2018. <https://www.thejakartapost.com/travel/2018/05/16/12-countries-issue-travel-advisories-following-terrorist-attacks.html>.



berpergian keluar suatu daerah sehingga peluang penyebaran penyakit ini diminimalisir. Data yang dikumpulkan misalnya seperti:

1. Data kesehatan yang dimiliki orang tersebut (misalnya yang dikumpulkan gawai yang dimiliki pengguna)
2. Data lokasi
3. Data daftar nama orang yang positif COVID tanpa gejala (orang tanpa gejala (OTG))
4. Data orang yang pernah berkontak dengan orang yang positif COVID baik dengan atau tanpa gejala
5. Data riwayat semua pasien COVID-19 di wilayah/negara tersebut

Bersama dengan faktor-faktor lainnya, semua data setelah diolah dengan menggunakan algoritma bisa menjadi salah satu faktor terpenting untuk memberikan skor kemungkinan atau skor resiko bagi orang tersebut, daerah tersebut, atau negara tersebut, yang nantinya dijadikan salah satu basis untuk memperketat atau memperlemah restriksi perjalanan ke atau dari daerah tersebut.

Hal ini bisa saja menyebabkan hal yang tidak diinginkan seperti munculnya bias pada hasil dari keputusan ini ke kelompok tertentu seperti halnya algoritma yang digunakan untuk menggunakan suspek teroris di bandara.^{115 116} Dalam kasus COVID-19, bisa saja terjadi bias pada negara-negara atau warga negara negara tertentu yang dianggap tidak bisa menekan penyebaran COVID-19 atau yang datanya tidak bisa diandalkan.

III. *Travel warning* ke daerah atau negara yang kasus penyebaran COVID-19nya tidak terkontrol yang bisa saja dikenakan secara tiba-tiba tanpa peringatan terlebih dahulu.

Hal ini sudah terjadi misalnya dalam kasus Inggris yang tiba-tiba mencabut travel bubblynya dengan Spanyol secara tiba-tiba.¹¹⁷ Wabah penyakit seperti COVID-19 mungkin

¹¹⁵ Stanley, Jay. "SPOT Off." American Civil Liberties Union, Juni 13, 2013.

<https://www.aclu.org/blog/national-security/discriminatory-profiling/spot>.

¹¹⁶ Schmidt, Michael S., and Eric Lichtblau. "Racial Profiling Rife at Airport, U.S. Officers Say." *The New York Times*, Agustus 11, 2012, sec. U.S. https://www.nytimes.com/2012/08/12/us/racial-profiling-at-boston-airport-officials-say.html?pagewanted=2&_r=1&hp.

¹¹⁷ Hughes, Laura, and Ian Mount. "UK Tells People Returning from Spain to Isolate for 2 Weeks." *Financial Times*, Juli 25, 2020. <https://www.ft.com/content/62dfbdaf-6cb1-45a8-92f7-a012aa347422>.

saja tidak akan hilang (tiba-tiba bahkan jika vaksin ditemukan sekalipun). Ada kemungkinan bahwa bisa saja akan ada masa dimana karena berbagai faktor masih ada daerah-daerah yang memiliki penyebaran COVID-19.

Dalam sejarah misalnya, walaupun wabah kolera di Hindia Belanda berhasil terkontrol hanya dalam waktu satu tahun (1919), kasus kolera yang sporadis tetap terjadi, dan bahkan terjadi wabah kecil kolera pada tahun 1937, dan kasus kolera di Indonesia tidak benar-benar hilang sampai tahun 1940.¹¹⁸

Penyakit cacar yang memiliki vaksin sekalipun, setelah WHO memulai rencana untuk memunahkan cacar (variola) pada 1959, membutuhkan waktu sekitar 21 tahun sampai WHO mendeklarasikan bahwa penyakit ini telah punah, hampir dua abad setelah vaksin penyakit ini ditemukan.¹¹⁹ Penyakit Polio malah masih ada sampai sekarang di daerah dimana masyarakatnya sulit dijangkau dan menerima vaksinasi.¹²⁰

Kebijakan travel warning yang bisa dicabut dan ditetapkan secara tiba-tiba tanpa peringatan terlebih dahulu jelas merugikan karena ini menimbulkan ketidakpastian yang berlebihan. Kembali ke kasus Inggris misalnya, hal ini lah yang menjadi salah satu protes operator bisnis wisata.¹²¹ Bukan tidak mungkin, hal seperti ini bukan hanya memberi efek negatif ke sektor lain selain pariwisata, tetapi juga investasi misalnya.

Skenario 1919

Skenario ini mengambil contoh sejarah dari kebijakan yang tadinya seharusnya hanya sementara, yaitu mewajibkan visa untuk keluar dan masuk AS yang diambil pada 1919, akhirnya menjadi permanen.¹²² Detil dari skenario dunia terpecah kurang lebih sama dengan skenario post-9/11, tetapi lebih ekstrem. Skenario ini memakai asumsi bahwa kebijakan

¹¹⁸ Pollitzer, R., S. Swaroop, and W. Burrows. "World Health Organization Monogram Series No. 43 Cholera." Geneva: World Health Organization, 1959. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/41711/WHO_MONO_43;jsessionid=BB8912DEEC302805891847EE2B6B7C74?sequence=1. Hal. 64-65

¹¹⁹ Centers for Disease Control and Prevention. "History of Smallpox," Agustus 30, 2016. <https://www.cdc.gov/smallpox/history/history.html>.

¹²⁰ Bhaumik, Soumyadeep. "Polio eradication: Current status and challenges." *Journal of family medicine and primary care* 1, no. 2 (2012): 84.

¹²¹ Hancock, Alice, and Laura Hughes. "Travel Operators Call for End to UK's 'Stop-Start' Coronavirus Quarantines." *Financial Times*, Agustus 20, 2020. <https://www.ft.com/content/737f542b-94ea-4550-8275-35cbef165a12>.

¹²² Torpey, J. C. (2018) "*The Invention of the Passport: ...*". Hal 144-145.

restriksi pergerakan manusia yang dilakukan untuk menghadapi COVID-19 hanya dilonggarkan dengan amat sangat lambat atau bahkan hampir tidak sama sekali, dan pelonggarannya sangat erat dengan nuansa politis.

Jika kebijakan restriksi kebijakan yang sangat ketat yang awalnya dilakukan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini tidak dilonggarkan dalam waktu lama, misalkan awalnya karena kekhawatiran akan terjadinya gelombang berikutnya COVID-19 yang tidak bisa dikendalikan, dan kebijakan seperti misalnya *travel bubble* hanya diberikan setelah negosiasi terpisah (baik bilateral maupun multilateral), maka ada kemungkinan bahwa negara-negara akan memprioritaskan satu negara atau wilayah dikarenakan kepentingan negara tersebut yang pada akhirnya menentukan alur tren kebijakan dalam mengatur pergerakan manusia antar-negara hingga jangka panjang bahkan jauh setelah pandemi COVID-19 sudah selesai.

AS misalnya menggunakan alasan COVID-19 untuk membatasi pemberian visa pekerja terampil baru dan mengurangi visa imigrasi,¹²³ dan bahkan memberi kebijakan baru untuk visa pelajar yang bisa memaksa banyak mahasiswa asing untuk keluar dari AS karena kelas mereka

kebanyakan akan dilakukan dalam bentuk virtual, walau kebijakan ini akhirnya dicabut.¹²⁴ Hal ini disebut sebagai salah satu pembatasan imigrasi paling ketat dalam sejarah AS sejak Perang Dunia Pertama.¹²⁵

Jika kita melihat tren dunia dalam jangka menengah dan panjang, maka kemungkinan terburuk yang bisa terjadi adalah dunia mengikuti skenario 1919. Hal ini dikarenakan tiga faktor:

- 1. Pertumbuhan penduduk dunia mulai melambat dan bahkan jatuh dengan umur populasinya yang semakin naik.¹²⁶**

¹²³ Miroff, Nick, and Tomy Romm. "Trump, Citing Pandemic, Orders Limits on Foreign Workers, Extends Immigration Restrictions through December." *Washington Post*, June 23, 2020. https://www.washingtonpost.com/immigration/trump-immigration-workers-coronavirus/2020/06/22/3b969e88-b489-11ea-9b0f-c797548c1154_story.html.

¹²⁴ "White House Drops Plan to Deport Foreign Students." *BBC News*, July 14, 2020, sec. US & Canada. <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53410285>.

¹²⁵ Somin, Ilya. "The Danger of America's Coronavirus Immigration Bans." *The Atlantic*, June 28, 2020. <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/06/danger-americas-coronavirus-immigration-bans/613537/>.

¹²⁶ Vollset, Stein Emil, Emily Goren, Chun-Wei Yuan, Jackie Cao, Amanda E. Smith, Thomas Hsiao, Catherine Bisignano et al. "Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study." *The Lancet* (2020).

Hal ini akan berefek paling parah pada awalnya di negara-negara maju pada akhirnya akan terjadi pada banyak negara di dunia,¹²⁷ termasuk banyak negara berkembang bahkan sekarang, seperti misalnya (tapi tidak hanya di) Iran,¹²⁸ Vietnam,¹²⁹ Thailand,¹³⁰ dan Brazil.¹³¹ Efek dari hal ini adalah negara-negara akan memperebutkan¹³² daerah-daerah yang masih memiliki angka kelahiran tinggi untuk menyuplai negaranya dengan anak muda untuk mengimbangi kelahiran yang kolaps¹³³ dan pasar untuk membiayai biaya perawatan populasi yang tua.¹³⁴

2. Tren decoupling antara AS dan Tiongkok

Decoupling dari AS dan Tiongkok tidak menunjukkan tanda berhenti bahkan di tengah pandemi. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah sejauh apa tren ini akan berlanjut di masa yang “lebih tenang” jika saat masa krisis global saja *decoupling* kedua negara tidak menunjukkan tanda berhenti?

3. Efek dari perubahan iklim

Salah satu efek dari perubahan iklim adalah keadaan cuaca ekstrem akan mulai meningkat. Hal ini dapat meningkatkan resiko negara gagal di banyak daerah di dunia, yang pada gilirannya bisa menyebabkan naiknya kembali misalnya wabah penyakit

akibat tidak adanya pemerintahan yang efektif di daerah-daerah tersebut, selain juga

¹²⁷ Vollset, Stein Emil, Emily Goren, Chun-Wei Yuan, Jackie Cao, Amanda E. Smith, Thomas Hsiao, Catherine Bisignano et al. (2020). "Fertility, mortality, migration, and population..."

¹²⁸ Bezorgmeh, Najmeh. "Iran's Demographic Crisis: 'How Can I Have Children When I Can Barely Make Ends Meet?'" Financial Times, August 23, 2020. <https://www.ft.com/content/c1bd20d6-f019-40ba-9ee7-b23e6150bf6c>.

¹²⁹ Handong, Li, Nguyen Hongngoc, and Zhou Tianmin. "Vietnam's Population Projections and Aging Trends from 2010 to 2049." *Journal of Population Ageing* (2020): 1-18.

¹³⁰ Towwie, Margo, Jason Clenfield, and Hannah Dormido. "Thailand Has a Developing Economy and a Big First World Problem." Bloomberg.com, 2019. <https://www.bloomberg.com/graphics/2019-thailand-baby-bust/>.

¹³¹ The World Bank. "Brazil Faces the Challenge of Ensuring the Country's Development as Its Population Ages." World Bank, April 6, 2011. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2011/04/06/brazil-faces-challenge-ensuring-countrys-development-population-ages>.

¹³² Gallagher, James. "'Jaw-Dropping' World Fertility Rate Crash Expected." *BBC News*, July 15, 2020, sec. Health. <https://www.bbc.com/news/health-53409521>.

¹³³ De Lima, P., S. Bernabè, R. L. Bubbico, S. Leonardo, and C. Weiss. "Migration and the EU: Challenges, opportunities, the role of EIB." *European Investment Bank* (2016). Hal 9

¹³⁴ Zeihan, Peter. *Disunited Nations : The Scramble for Power in an Ungoverned World*. HarperCollins, 2020. Hal 159-162



instabilitas global. Peran perubahan iklim sebagai akselerator ancaman inilah kenapa Pentagon AS¹³⁵ dan NATO¹³⁶ memasukkan perubahan iklim ke daftar ancaman stabilitas global.

Hal ini bisa saja akan membuat dunia menjadi terpecah menjadi berbagai blok dimana pergerakan manusia akan lebih restriktif atau liberal bergantung kepada lebih dekat kepada siapa suatu negara dengan negara lainnya, mirip secara sekilas seperti sistem kolonial sebelum zaman *Bretton Woods*, dimana suatu *Great Power* memiliki keuntungan komparatif (atau skenario terburuk, bahkan nyaris eksklusif) untuk mengakses peluang investasi di suatu wilayah atau negara karena *travel bubble* yang tadinya diterapkan untuk menghadapi pandemi COVID-19 malah menjadi pembentuk garis pembatas baru dari dunia masa depan yang multipolar (tidak didominasi oleh satu kekuatan). Sementara itu restriksi mobilitas akan dinaikkan untuk daerah-daerah lain yang wilayahnya kolaps karena ketakutan penyebaran penyakit atau kejahatan dari daerah-daerah dimana pemerintahnya telah kolaps.

Jika pada era kolonial daerah jajahan menjadi daerah penyuplai sumber daya alam dan pasar, maka di masa depan, tanpa adanya satu kekuatan yang mendominasi dan membuat satu aturan untuk menjamin pergerakan manusia yang bebas, seperti di abad 20 dimana ada komitmen dari negara-negara sekutu untuk menjamin akses ke sumber daya alam bagi semua negara, maka akan ada perebutan oleh negara-negara besar untuk wilayah dan negara-negara yang memiliki surplus penduduk untuk menjadi pasar dan penyuplai SDM ke negara-negara berpengaruh (*Great Powers*), sementara beberapa daerah lain justru “dikarantina” karena ketakutan menyebarnya kekacauan dan penyakit menular dari wilayah-wilayah yang pemerintahnya telah kolaps akibat tekanan perubahan iklim, seperti situasi sekarang dimana ada negara yang memiliki perjanjian untuk mengontrol arus migran agar negara destinasinya tidak kewalahan.¹³⁷

¹³⁵ 115th Congress, House of Representative. “NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT FOR FISCAL YEAR 2018 CONFERENCE REPORT TO ACCOMPANY H.R. 2810,” November 2017. Hal 165

¹³⁶ IISD Knowledge Hub. “NATO: Climate Change Poses Significant Threat Multipliers,” October 13, 2015. <https://sdg.iisd.org/news/nato-climate-change-poses-significant-threat-multipliers/>.

¹³⁷ BBC News. “Migrant Crisis: EU-Turkey Deal Comes into Effect,” March 20, 2016. <https://www.bbc.com/news/world-europe-35854413>.

Alternatifnya, negara-negara *Middle Power* bisa saja akan menjadi penentu akan seperti apa konsensus aturan global mengenai “aturan main” yang mana yang ditawarkan negara-negara *Great Power* mengenai pergerakan manusia seperti apa yang akan menjadi lumrah di dunia.

Dalam kasus ini, justru peran negara-negara kekuatan menengah (*Middling Power*) justru akan menjadi penentu masa depan dunia.

2. Berubahnya permintaan konsumen dan investor untuk berwisata dan berinvestasi dikarenakan pandemi COVID-19 yang membentuk pasar bahkan setelah pandemi COVID-19 berakhir

Pandemi COVID-19 telah merubah dunia wisata. Banyak destinasi wisata yang mengandalkan turis asing misalnya, praktis kolaps dikarenakan negara-negara yang biasanya warganya menjadi turis asing tidak lagi bisa berpergian ke tempat-tempat tersebut. Tren wisata misalnya, sekarang mulai berubah.

Di Inggris misalnya, salah satu negara pengirim wisatawan asing terbesar ke Indonesia, jenis wisata yang diambil berubah dari jenis wisata yang diambil oleh wisatawan pada zaman pre COVID-19, tidak lagi berfokus ke destinasi yang banyak didatangi orang dan memilih tempat-tempat yang relatif belum terjamah oleh turisme massal.¹³⁸

Banyak wisatawan yang biasanya berpergian keluar memilih untuk berwisata di negara mereka sendiri.¹³⁹ Ada juga satu hal baru yang muncul sebagai hal yang bisa mendorong calon wisatawan asing untuk berpergian keluar negeri, yaitu asuransi perjalanan yang jauh lebih komprehensif yang menanggung gangguan perjalanan akibat COVID-19.¹⁴⁰

Sementara di Tiongkok misalnya, tren wisata juga mulai berubah. Mereka yang memilih wisata individual daripada wisata kelompok mulai naik.¹⁴¹

¹³⁸ Robbins, Tom. “Shortcuts: Surge in Solo and off-Grid Holidays, While Ski Companies Suffer.” *Financial Times*, Agustus 21, 2020. <https://www.ft.com/content/9b6b9a77-7a35-4f12-aea2-a635bc8aafb7>.

¹³⁹ Hancock, Alice. “Britons Shun Foreign Travel for Holidays at Home.” *Financial Times*, Juli 2, 2020. <https://www.ft.com/content/efcb225a-3c5c-4295-b173-22c1f600e110>.

¹⁴⁰ Global Web Index. “GWI Coronavirus Research | Maret 2020 Series 2: Travel & Commuting,” Maret 2020. [https://www.globalwebindex.com/hubfs/1.%20Coronavirus%20research%20assets/GWI%20coronavirus%20findings%20Maret%202020%20-%20Travel%20\(Release%20\).pdf](https://www.globalwebindex.com/hubfs/1.%20Coronavirus%20research%20assets/GWI%20coronavirus%20findings%20Maret%202020%20-%20Travel%20(Release%20).pdf).

¹⁴¹ IPP World. “Recovering China: Who Is Travelling Where After COVID-19.” *Hotel News Resource*, June 25, 2020. <https://www.hotelnewsresource.com/article111256.html>.

Memang, kita tidak tahu apakah tren ini akan berlanjut kedepannya, tetapi ada kemungkinan bahwa setidaknya tren ini akan mempengaruhi seperti apa tren dunia pariwisata kedepannya setidaknya hingga jangka pendek.

Dari segi investasi, pandemi COVID-19 juga telah mengubah investasi dengan cukup besar. Bagi beberapa negara, pandemi COVID-19 ini dipandang sebagai kesempatan untuk melakukan pembelian besar-besaran. Banyak negara mulai melihat ke rantai suplai mereka dan mulai untuk berinvestasi di sektor-sektor dasar dan penting untuk menjamin keamanan rantai suplai mereka, terutama di sektor kesehatan^{142 143} dan makanan.¹⁴⁴

COVID-19 juga telah mendorong banyak negara untuk melakukan diversifikasi dan, mendompleng sentiment anti-Tiongkok sebelumnya, mendorong beberapa negara untuk mendorong atau bahkan mensubsidi¹⁴⁵ perusahaan-perusahaan mereka untuk keluar dari Tiongkok dan mengurangi sebaran rantai suplai mereka secara geografis.¹⁴⁶

3. Pandangan internasional terhadap hasil yang berbeda-beda dari respons pemerintah berbagai negara kepada pandemi ini yang digunakan untuk kepentingan politik

Pandangan dunia internasional terhadap penanganan COVID-19 di suatu negara telah menjadi salah satu topik yang menjadi titik panas perdebatan antar negara di dunia. Di tingkat dua negara besar, AS dan Tiongkok misalnya, Presiden AS, Donald Trump misalnya, menuduh respons Tiongkok terhadap COVID-19 tidak becus dan menyebabkan virus ini menyebar kemana-mana.¹⁴⁷ Tiongkok membalas melalui media resminya dengan memberi timeline dari

¹⁴² Williams, Aime. "US Lawmakers Push to Reclaim Medical Supply Chains from China." *Financial Times*, April 2, 2020. <https://www.ft.com/content/d71c01db-5333-470b-abcd-0df126864447>.

¹⁴³ Aboud, Leila, and Michael Peel. "Covid-19 Hastens French Push to Bring Home Medicines Manufacture." *Financial Times*, Juli 29, 2020. <https://www.ft.com/content/80a4836b-ca25-48e0-996d-458186e968dc>.

¹⁴⁴ England, Andrew, and Amiko Terazono. "Pandemic Revives Gulf Fears over Food Security." *Financial Times*, August 5, 2020. <https://www.ft.com/content/5ff72ce2-5947-497e-ac83-4aa4d008a73d>.

¹⁴⁵ Tsuji, Takashi, and Kazuhiro Furuyama. "Japan Preps First Subsidy to Company Moving Production out of China." *Nikkei Asian Review*, April 21, 2020. <https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/Japan-preps-first-subsidy-to-company-moving-production-out-of-China>.

¹⁴⁶ Beattie, Alan. "Will Coronavirus Pandemic Finally Kill off Global Supply Chains?" *Financial Times*, May 28, 2020. <https://www.ft.com/content/4ee0817a-809f-11ea-b0fb-13524ae1056b>.

¹⁴⁷ Reuters. "Trump Says China Could Have Stopped Coronavirus, Beijing Decries Shifting of Blame." *The Jakarta Post*, April 28, 2020. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/28/trump-says-china-could-have-stopped-coronavirus-beijing-decries-shifting-of-blame.html>.

respons Tiongkok ke COVID-19 dari awal.¹⁴⁸ Bagi negara-negara lain, respons kepada pandemi ini telah menjadi tes bagi sistem negara tersebut. Negara-negara yang dianggap berhasil menghadapi pandemi ini mendapati *soft power* mereka di tingkat internasional naik, seperti misalnya Vietnam^{149 150 151} dan Selandia Baru^{152 153 154} yang mendapat pujian dari banyak pihak di tingkat internasional karena respons melawan COVID-19nya dianggap sangat bagus.

Untuk Vietnam, keadaan Vietnam sebagai negara masih berkembang yang berhasil mendapat hasil yang sangat bagus melawan pandemi COVID-19 khususnya mendapat sorotan.¹⁵⁵ Dalam situasi dimana Vietnam mendapat banyak perhatian sejak zaman pre COVID-19 untuk investasi sebagai salah satu negara alternatif selain Tiongkok, maka pemberitaan positif seperti ini jelas meningkatkan kepercayaan investor kepada Vietnam. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 meningkatkan resiko beroperasi di suatu negara, dan semakin terkontrol penyebaran pandemic, semakin kecil resiko tersebut.¹⁵⁶

Ada juga kasus dimana *soft power* ini berhasil diubah menjadi kemenangan dalam geopolitik, yaitu Republik Tiongkok (Taiwan). Pejabat Taiwan mengatakan bahwa mereka sudah

¹⁴⁸ New China TV. "Once upon a Virus..." Video Youtube. *YouTube*, April 29, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=Q5BZ09iNdvo&feature=emb_logo.

¹⁴⁹ Pollack, Todd, Guy Thwaites, Maia Rabaa, Marc Choisy, Rogier van Doorn, Duong Huy Luong, Dang Quang Tan, et al. "Emerging COVID-19 Success Story: Vietnam's Commitment to Containment." *Our World in Data*, June 30, 2020. <https://ourworldindata.org/covid-exemplar-vietnam>.

¹⁵⁰ Thu, Huong Le. "Vietnam: A Successful Battle Against the Virus." *Council on Foreign Relations*, April 30, 2020. <https://www.cfr.org/blog/vietnam-successful-battle-against-virus>.

¹⁵¹ Black, George. "Vietnam May Have the Most Effective Response to Covid-19." *www.thenation.com*, April 24, 2020. <https://www.thenation.com/article/world/coronavirus-vietnam-quarantine-mobilization/>.

¹⁵² Baker, Michael, and Nick Wilson. "Elimination: What New Zealand's Coronavirus Response Can Teach the World | Michael Baker and Nick Wilson." *The Guardian*, April 10, 2020, sec. World news. <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/10/elimination-what-new-zealands-coronavirus-response-can-teach-the-world>.

¹⁵³ Richter, Konstantin. "How New Zealand Beat the Coronavirus." *POLITICO*, May 14, 2020. <https://www.politico.eu/article/kiwis-vs-coronavirus-new-zealand-covid19-restrictions-rules/>.

¹⁵⁴ Gulley, Aaron. "New Zealand Has 'Effectively Eliminated' Coronavirus. Here's What They Did Right." *Travel*, April 30, 2020. <https://www.nationalgeographic.com/travel/2020/04/what-new-zealand-did-right-in-battling-coronavirus/>.

¹⁵⁵ International Monetary Fund. "Vietnam's Success in Containing COVID-19 Offers Roadmap for Other Developing Countries." *IMF*, Juni 29, 2020. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/29/na062920-vietnams-success-in-containing-covid19-offers-roadmap-for-other-developing-countries>.

¹⁵⁶ Baldwin, Richard, and Beatrice Weder di Mauro. "Economics in the Time of COVID-19." (2020). Hal 46-50

mengirimkan surat kepada WHO mengenai situasi sebenarnya penyebaran COVID-19, tetapi tidak digubris,¹⁵⁷ walau hal ini dibantah WHO.¹⁵⁸

Argumen ini akhirnya digunakan sebagai salah satu argumen AS untuk menyatakan bahwa WHO terlalu mementingkan pertimbangan politik disbanding pertimbangan berbasis ilmiah.¹⁵⁹ Pemerintah Republik Tiongkok (Taiwan) akhirnya menggunakan hal ini untuk mempererat hubungannya dengan AS. Kunjungan resmi oleh Menteri Kesehatan AS ke Taiwan, kunjungan pertama oleh pejabat tinggi AS ke Taiwan dalam 40 tahun,¹⁶⁰ adalah bentuk keberhasilan Taiwan untuk mendekat kembali dengan AS.

Negara lain yang dianggap gagal menghadapi pandemi ini mendapati *image* mereka memburuk di kalangan internasional. Belum terlihat jelas apa efek jangka panjang dan menengah dari hal ini. Ada misalnya yang memperkirakan bahwa kegagalan berbagai pemerintahan yang dicap populis akan menghentikan arus gelombang populisme di dunia,¹⁶¹ walau ada juga yang berpendapat bahwa populisme akan tetap bertahan bahkan setelah menghadapi pandemi ini.¹⁶²

Bisa disimpulkan bahwa respons negara-negara ke pandemi COVID-19 ini mempengaruhi prestis dan *soft power* mereka, yang bisa menjadi salah satu alat diplomasi yang bisa sangat efektif, seperti yang ditunjukkan dalam kasus Taiwan. Jelas, pandangan internasional mengenai keefektifan respons kepada pandemic COVID-19 adalah satu pertimbangan yang tidak bisa dianggap remeh.

Restriksi Perjalanan Peninggalan COVID-19 Sebagai Kartu Diplomasi Baru?

¹⁵⁷ FT Reporters. "Taiwan Says WHO Failed to Act on Coronavirus Transmission Warning." www.ft.com, March 20, 2020. <https://www.ft.com/content/2a70a02a-644a-11ea-a6cd-df28cc3c6a68>.

¹⁵⁸ World Health Organization. "Virtual Press Conference 4 May 2020," Mei 4, 2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-emergencies-coronavirus-press-conference-04may2020.pdf?sfvrsn=3ef4c516_4.

¹⁵⁹ AFP. "US Criticizes WHO for Ignoring Taiwan Virus Warnings." France 24, April 9, 2020. <https://www.france24.com/en/20200409-us-criticizes-who-for-ignoring-taiwan-virus-warnings>.

¹⁶⁰ Tanaka, Miya. "Taiwan Comes to Fore as Trump Toughens China Stance Ahead of Election." The Japan Times, August 10, 2020. <https://www.japantimes.co.jp/news/2020/08/10/asia-pacific/taiwan-donald-trump-china-election/>.

¹⁶¹ Rachman, Gideon. "Coronavirus Could Kill off Populism." www.ft.com, Juni 29, 2020. <https://www.ft.com/content/3bcf2b5e-e5f1-48e4-bb15-cd29615a9198>.

¹⁶² Balfour, Rosa. "Why Populism Can Survive the Pandemic." Carnegie Europe, Juli 15, 2020. <https://carnegieeurope.eu/2020/07/15/why-populism-can-survive-pandemic-pub-82293>.

Kebijakan restriksi perjalanan bahkan sebelum pandemi COVID-19 pun sudah digunakan oleh negara-negara sebagai salah satu alat negosiasi dalam hubungan internasional, dalam soal pemberian visa misalnya, hal ini seringkali digunakan untuk membuat statement politik.¹⁶³

Tiongkok misalnya juga menggunakan restriksi wisata sebagai alat diplomasi dengan negara lain, seperti misalnya yang dilakukan Tiongkok dengan Korea Selatan menyusul ketegangan diantara keduanya.¹⁶⁴

Namun, dunia pasca COVID-19 ini mungkin akan memberi restriksi perjalanan, seperti ini misalnya, peran yang lebih kuat dalam hubungan antar negara. Tanda dari hal ini sudah mulai bisa terlihat.

Misalnya, pada negosiasi *travel bubble* untuk keperluan bisnis. Jepang disinyalir membuka *travel bubble* dengan negara tertentu karena takut jika Jepang mengutamakan membuka *travel bubble* dengan negara tertentu, maka akan memperlihatkan keberpihakan Jepang pada Tiongkok atau AS diatas yang lainnya.¹⁶⁵ Inggris dan Prancis juga bersitegang dan mengancam saling balas mengenakan restriksi ke satu sama lain.¹⁶⁶

Jika hal ini menunjukkan tren kedepan, maka kebijakan pembukaan kembali pasca Pandemi COVID-19 bisa jadi akan menjadi sangat politis, dan bisa dengan mudah menjebak negara-negara kedalam situasi yang tidak mereka inginkan.

Indonesia: Membangun Dunia Kembali

“Dan saya minta dengan hormat, hendaknya Tuan-tuan ingat bahwa sejarah memperlakukan mereka yang gagal tanpa mengenal ampun.”

¹⁶³ Stringer, Kevin. “Visa Diplomacy.” *Diplomacy & Statecraft* 15, no. 4 (December 2004): 655–82. <https://doi.org/10.1080/09592290490886775>.

¹⁶⁴ Reuters. “Chinese Tourists Return to South Korea as Tensions Ease.” *South China Morning Post*, May 2, 2018. <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2144327/chinese-tourists-returning-south-korea-after-missile>.

¹⁶⁵ Nguyen, Malle. “Why Japan Put Forth Business Travel with Vietnam, Thailand Instead of US and China?” *Vietnam Times*, June 22, 2020. <https://vietnamtimes.org.vn/why-japan-put-forth-business-travel-with-vietnam-thailand-instead-of-us-and-china-21583.html>.

¹⁶⁶ Parker, George, and Alice Hancock. “UK Considers Adding France to Covid-19 Quarantine List.” *www.ft.com*, August 12, 2020. <https://www.ft.com/content/db9b331e-869c-465e-9962-ea207ecf7c4f>.

-Sukarno¹⁶⁷

Kekhawatiran bahwa Indonesia tidak terkucil dalam hal mendapat akses travel bubble ke negara lain adalah kekhawatiran yang sudah diangkat oleh media di tanah air. Kekhawatiran ini muncul setelah Indonesia tidak dilibatkan kedalam *travel corridor* antara Singapura dan Malaysia.¹⁶⁸ Apalagi ketika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam,¹⁶⁹ Indonesia terlihat jauh tertinggal dalam soal ini. Ada juga pihak yang ragu mengenai apakah Indonesia bisa masuk kedalam *travel bubble* dengan negara lain dikarenakan situasi penyebaran COVID-19 di Indonesia.¹⁷⁰ Pembukaan Bali ke kedatangan internasional pun ditunda.¹⁷¹

Walau Indonesia telah berhasil menandatangani perjanjian *travel corridor* untuk bisnis dengan Uni Emirat Arab dan Korea Selatan, masih banyak negara-negara di daftar 10 besar partner investasi Indonesia yang belum mempunyai perjanjian serupa. Hal ini jelas mengkhawatirkan, terutama karena negara-negara tetangga yang lebih berhasil dalam soal ini berarti mereka memiliki keunggulan komparatif dibandingkan Indonesia dalam menarik investor dan turis asing.

Apa yang harus dilakukan Indonesia dalam menghadapi tantangan ini?

Untuk jangka pendek, kita harus menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan kita tidak bisa mengambil kesempatan seperti negara tetangga kita dan mengambil contoh yang bisa berjalan dari negara lain. Kita bisa memulai dalam jangka pendek misalnya:

1. Tingkatkan fokus dan usaha melawan COVID-19

¹⁶⁷ Sukarno. "MEMBANGUN DUNIA KEMBALI (TO BUILD THE WORLD A NEW)." In-Person. Dibacakan saat Sidang Umum PBB ke-XV, September 30, 1960. https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/uploaded_files/pdf/speech/normal/soekarno12.pdf.

¹⁶⁸ Elfira, Rizka. "Malaysia-Singapura Bikin Travel Bubble, Tak Ajak Indonesia?" detikTravel, July 13, 2020. <https://travel.detik.com/travel-news/d-5091886/malaysia-singapura-bikin-travel-bubble-tak-ajak-indonesia>.

¹⁶⁹ Kato, Yuichi Miyahara, Paul Cherrone, Mayu. "Japan – Phased Resumption of Cross-Border Travel with Thailand and Vietnam - KPMG Global." KPMG, Agustus 6, 2020. <https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/08/flash-alert-2020-341.html>.

¹⁷⁰ Septiari, Dian. "Doubts Loom over Indonesia's 'travel Bubble' Plan." The Jakarta Post, June 18, 2020. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/17/doubts-loom-over-indonesias-travel-bubble-aim.html>.

¹⁷¹ Erviani, Ni Komang. "Bali Postpones Plans to Welcome International Travelers in September." The Jakarta Post, August 24, 2020. <https://www.thejakartapost.com/travel/2020/08/24/bali-postpones-plans-to-welcome-international-travelers-in-september.html>.

Indonesia bisa melakukan ini dengan misal menambah kapasitas alat kesehatan dan test COVID-19, sehingga setidaknya kemampuan tes COVID-19 per kapita di mayoritas wilayah Indonesia mencapai standar WHO. Usaha *contact tracing* juga harus ditambah agar kita bisa mendeteksi dan mengisolasi orang yang memiliki virus SARS COVID-19.

2. Perketat pengawasan di Bandara dan *contact tracing* turis asing, juga tambahkan hotline COVID-19 dalam bahasa asing

Walaupun setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, belum ada peraturan secara khusus yang mengatur mengenai kewenangan Dirjen Imigrasi terkait *contact tracing*.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Dirjen Imigrasi wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi meliputi pemeriksaan dikumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah. Terkait dengan penanganan COVID-19 Dirjen Imigrasi juga harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/313/2020 Tentang Protokol Kesehatan Masuknya WNI dan WNA Melalui Pintu Masuk Negara

Kewenangan Dirjen Imigrasi dalam membantu melakukan Contact Tracing dasar hukum nya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/313/2020 Tentang Protokol Kesehatan Masuknya WNI dan WNA Melalui

Pintu Masuk Negara, dan Permenkumham No.11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia.

Dirjen Imigrasi memiliki kewenangan untuk ikut membantu pemutusan mata rantai COVID-19 dengan melakukan Contact Tracing terkait pembatasan seseorang terutama turis yang ingin keluar masuk wilayah Indonesia hal ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang telah bertemu dengan penderita virus corona, yang juga akan memudahkan petugas kesehatan untuk mengambil tindakan agar virus ini tidak menyebar semakin luas.



Tetapi peraturan yang secara khusus yang mengatur mengenai kewenangan Dirjen Imigrasi terkait contact tracing sendiri belum ada. Ada baiknya jika aturan yang mengatur kewenangan khusus ini dibuat permanen sehingga Dirjen Imigrasi bisa berpartisipasi aktif dalam jangka panjang jika sewaktu-waktu terjadi kejadian serupa.

Selain itu, penambahan contact hotline COVID-19 dalam bahasa asing (minimal bahasa Inggris) juga mutlak dilakukan agar turis asing dapat menerima informasi terkait COVID-19 dengan cepat.

3. Visa elit khusus

Thailand baru –baru ini mengeluarkan kategori visa elit khusus untuk menetap dengan biaya cukup tinggi. Visa ini juga memberikan layanan lebih seperti *medical check up* gratis.¹⁷² Indonesia mungkin bisa meniru kebijakan Thailand dan mengeluarkan visa khusus untuk turisme ke daerah Indonesia yang disenangi wisatawan, misalnya Bali atau Lombok.

4. *Travel corridor* per daerah ke luar negeri

Daerah di Indonesia yang sudah memenuhi standar WHO untuk tes dan juga sudah mengontrol penyebaran COVID-19 di daerahnya bisa untuk berkerjasama langsung dengan negara lain untuk membuat *travel corridor* langsung dari daerahnya ke negara lain.

Dengan bantuan sumber daya pemerintah pusat dan sumber daya daerah, fokus sumber daya juga bisa dikerahkan ke daerah-daerah prioritas ini agar mereka bisa mengontrol pandemi dan keuangan negara juga terbantu dengan masuknya devisa dari program ini. Hal ini bisa membantu untuk daerah, terutama daerah yang memiliki hubungan ekonomi kuat dengan negara lain, seperti Batam misalnya, atau yang secara ekonomi membutuhkan akses dengan dunia luar, seperti Bali, atau daerah industri, untuk memulihkan kembali ekonominya.

¹⁷² Chuwiruch, Natnicha. "Elite Thai Visa Program Aims to Lure Expats Seeking Virus Haven." Bloomberg.com, August 14, 2020. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-14/elite-thai-visa-program-aims-to-lure-expats-seeking-virus-haven>.

Bukan tidak mungkin, daerah wisata di Indonesia bukan saja bisa mengontrol pandemic COVID-19 di daerahnya, tetapi juga bisa menjadi destinasi wisata medis jika pemerintah memberikan pemantik untuk investasi ke sektor kesehatan di daerah ini.

Jangka menengah dan panjang

1. Memikirkan ulang posisi, kekuatan, dan kelemahan Indonesia

COVID-19 telah mengubah banyak hal, termasuk hal-hal yang sebelumnya dianggap umum seperti perjalanan antar negara. Indonesia perlu untuk mulai memikirkan ulang bagaimana agar bisa memajukan kepentingan umum dan nasional dalam dunia yang mungkin akan berubah signifikan. Kelamahan Indonesia juga perlu mendapat perhatian lebih, agar tidak menjadi sesuatu yang menyandung Indonesia di masa depan.

2. Menaikkan *image* dan *soft power* Indonesia

Soft power dan *image* suatu negara sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan turis dan investor ke suatu negara, dan, seperti yang kita lihat di bagian sebelumnya, juga bisa digunakan untuk mendapat keuntungan yang bersifat *hard power*.

3. Menjalin hubungan dengan sesama negara ASEAN dan non-blok untuk memastikan agar suara Indonesia dan negara berkembang lain didengar.

Merujuk kepada pernyataan sebelumnya di skenario 1919, negara *middle power* seperti Indonesia bisa memiliki peran yang besar dalam menentukan seperti apa dunia akan terlihat di masa depan. Indonesia perlu menjalin hubungan dan membentuk koalisi agar suaranya dapat didengar dalam dibentuknya tatanan dunia baru dalam pergerakan manusia antar negara. Bahkan walaupun skenario terburuk tersebut tidak terjadi, suara dan upaya Indonesia menggalang koalisi negara-negara berkembang untuk ikut serta dalam penentuan tatanan dunia post-Covid 19 akan memastikan bahwa tatanan dunia Post-COVID 19 tidak hanya ditentukan oleh beberapa negara besar, tetapi konsensus bersama negara-negara di dunia.

Hal ini pada akhirnya bisa jadi akan menjadi kontribusi nyata Indonesia dalam mencapai dunia yang adil dan makmur di abad 21.

Rangkuman

“Bagaimana kalau dunia COVID-19 adalah apa yang negara-negara artikan sendiri?”

- Thomas Rausch¹⁷³

Pandemi COVID-19 adalah sebuah *black swan event* yang mengubah banyak hal di dunia, dan mungkin akan dilihat kembali sebagai titik balik dunia. Globalisasi yang dahulu dianggap tidak bisa dilawan, akhir-akhir ini dihantam dengan *decoupling* dari negara-negara besar, lalu tiba-tiba menghadapi *shock* yang luar biasa yang membuat orang ragu bagaimana masa depan globalisasi kedepannya.

Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang akan menjadi pengaruh jangka panjang COVID-19 jika kita melihat tren *decoupling* dan tren lainnya? Kami menyentuh dalam *White Paper* ini sejarah globalisasi dan contoh kebijakan yang tadinya adalah sementara, tetapi akhirnya malah menjadi permanen dan membentuk dunia hingga sekarang ini sebagai skenario terburuk (Skenario 1919).

Tujuan dari hal ini adalah untuk menghindarkan kita dari bias bahwa semua hal akan kembali seperti semula, bahwa ada kemungkinan bahwa masa depan akan berubah dibanding dengan masa Pre COVID-19. Tentu, skenario terburuk bukan satu-satunya kemungkinan, karena itu kami juga menyentuh skenario *Post-9/11* sebagai skenario yang lebih ringan, yang tidak menekankan pada *decoupling*, tetapi tetap memiliki efek yang besar.

Dalam keadaan dunia yang tak menentu, penting kiranya bagi Indonesia untuk fleksibel, tetapi tetap memperhatikan kepentingannya, sembari menjalin koalisi dengan negara-negara sahabat,

¹⁷³ Rausch, Thomas. (2020). *“What If the Covid19 World....”*



dan berusaha agar tidak terjebak dalam keadaan yang tidak diinginkan. Karena itulah, meningkatkan kepercayaan internasional juga mutlak dilakukan.

Situasi krisis seperti ini menuntut kita bergerak cepat untuk mengahdapi segala tantangannya. Walaupun begitu, kita harus juga berani gagal, dan mengakui gagal secara public jika kita gagal, agar kita bisa belajar dari kesalahan dan fleksibel mencoba berbagai pendekatan.

Tentang Penulis



Pasha Aulia Muhammad terlahir di Bandung pada 21 Juni 1999. Penulis saat ini masih berada pada tahun ketiga dari empat tahun total waktu pendidikan Bachelor (S-1) Political Science and World Politics di National Research University Higher School of Economics St. Petersburg Filial.

Penulis juga sempat mendapat kehormatan untuk mengikuti program pertukaran pelajar Erasmus selama satu semester di University College London School of Slavonic and East European Sciences (UCL SSEES). Selain itu, penulis juga aktif di berbagai aktivitas ekstrakurikuler, seperti MUN misalnya, baik sebagai delegate maupun chair, dan berpartisipasi aktif di berbagai organisasi dan menjadi sukarelawan di berbagai kegiatan baik di dalam maupun di luar negeri, seperti misalnya di Permira Rusia, AIESEC Rusia, KMI-REET, dan KNPI.



Sudharmono Saputra, S.H., M.H., lahir di Tanjung Karang tanggal 12 Maret 1991. Jenjang pendidikan dasar ia tempuh di SDN 2 Rawa Laut, Bandar Lampung dan SMPN 1 Bandar Lampung. Adapun jenjang pendidikan menengah di SMAT Krida Nusantara Bandung dan SMA N 9 Bandar Lampung. Kemudian, ia menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan melanjutkan jenjang Magister Hukum Bisnis di Universitas Gajah Mada.

Saat ini, ia telah menyelesaikan pendidikan LLM International Commercial Law di Bournemouth University. Sampai saat ini, ia tercatat sebagai Advokat pada Organisasi Advokat PERADI dan juga tercatat sebagai Kurator dan Pengurus pada Organisasi AKPI

Daftar Pustaka

1. “PKPP: Keluar Masuk Negara Masih Tidak Dibenarkan Kecuali Dengan Kebenaran & SOP Ketat.” *Buletin TV3*, 11 Aug. 2020, www.buletintv3.my/video/nasional/pkpp-keluar-masuk-negara-masih-tidak-dibenarkan-kecuali-dengan-kebenaran-and-sop-ketat.
2. “White House Drops Plan to Deport Foreign Students.” *BBC News*, July 14, 2020, sec. US & Canada. <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53410285>.
3. 107th US Congress. “UNITING AND STRENGTHENING AMERICA BY PROVIDING APPROPRIATE TOOLS REQUIRED TO INTERCEPT AND OBSTRUCT TERRORISM (USA PATRIOT ACT) ACT OF 2001.” Washington: US Government Publishing Office, 2001. <https://www.congress.gov/107/plaws/publ56/PLAW-107publ56.pdf>.
4. 115th Congress, House of Representative. “NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT FOR FISCAL YEAR 2018 CONFERENCE REPORT TO ACCOMPANY H.R. 2810,” November 2017.
5. AFP. “US Criticizes WHO for Ignoring Taiwan Virus Warnings.” *France 24*, April 9, 2020. <https://www.france24.com/en/20200409-us-criticizes-who-for-ignoring-taiwan-virus-warnings>.
6. Atti Parlamentari della Camera dei Senatori: Discussioni, Legislatura XXIa, la Sessione 1900–1901. Rome, Forzani e C. Tipografi del Senato, 1901.
7. Badan Pusat Statistik. Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2019. BPS RI, 26 Juni 2020, www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=OTRjZWlwMTE1NDBiZDBjZDczZTM0NzRj&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxyY2F0aW9uLzIwMjAvMDYvMjYvOTRjZWlwMTE1NDBiZDBjZDczZTM0NzRjL3N0YXRpc3RpaylrdW5qdW5nYW4td2lzYXRhd2FuLW1hbmNhbWVnYXJhLTIwMTkuaHRtbA%3D%3D&twoadfnoarfeaf=MjAyMC0wOC0wOSAxNDoyNjoxMQ%3D%3D.
8. Baker, Michael, and Nick Wilson. “Elimination: What New Zealand’s Coronavirus Response Can Teach the World | Michael Baker and Nick Wilson.” *The Guardian*, April 10, 2020, sec. World news. <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/10/elimination-what-new-zealands-coronavirus-response-can-teach-the-world>.
9. Baldwin, Richard E. “Global supply chains: why they emerged, why they matter, and where they are going.” (2012)
10. Baldwin, Richard, and Beatrice Weder di Mauro. “Economics in the Time of COVID-19.” (2020).
11. Balfour, Rosa. “Why Populism Can Survive the Pandemic.” *Carnegie Europe*, Juli 15, 2020. <https://carnegieeurope.eu/2020/07/15/why-populism-can-survive-pandemic-pub-82293>.

12. Barabanov, Oleg. "Will Global Mobility Recover After the Pandemic?" Valdaic Club, June 18, 2020. <https://valdaicclub.com/a/highlights/will-global-mobility-recover-after-the-pandemic/>.
13. BBC News. "Migrant Crisis: EU-Turkey Deal Comes into Effect," March 20, 2016. <https://www.bbc.com/news/world-europe-35854413>.
14. Beattie, Alan. "Will Coronavirus Pandemic Finally Kill off Global Supply Chains?" Financial Times, May 28, 2020. <https://www.ft.com/content/4ee0817a-809f-11ea-b0fb-13524ae1056b>.
15. Bernama. "Tourism Minister: Malaysia Mulling Travel Bubbles with Covid-19-Free Regions." *Malay Mail*, 24 July 2020, www.malaymail.com/news/malaysia/2020/07/24/tourism-minister-malaysia-mulls-implementing-travel-bubbles-with-green-stat/1887824.
16. Bezorgmeh, Najmeh. "Iran's Demographic Crisis: 'How Can I Have Children When I Can Barely Make Ends Meet?'" Financial Times, August 23, 2020. <https://www.ft.com/content/c1bd20d6-f019-40ba-9ee7-b23e6150bf6c>.
17. Bhaumik, Soumyadeep. "Polio eradication: Current status and challenges." *Journal of family medicine and primary care* 1, no. 2 (2012): 84.
18. Black, George. "Vietnam May Have the Most Effective Response to Covid-19." www.thenation.com, April 24, 2020. <https://www.thenation.com/article/world/coronavirus-vietnam-quarantine-mobilization/>.
19. Campbell, Kurt M., and Rush Doshi. "The Coronavirus Could Reshape Global Order." *Foreign Affairs*, March 20, 2020. <https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-03-18/coronavirus-could-reshape-global-order>.
20. CDC. "Travelers Prohibited from Entry to the United States." Centers for Disease Control and Prevention, 15 Jun. 2020, www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/from-other-countries.html.
21. Centers for Disease Control and Prevention. "History of Smallpox," August 30, 2016. <https://www.cdc.gov/smallpox/history/history.html>.
22. Chdany, Laurence, dan Brian Seidel. "Is Globalization's Second Wave about to Break?." *Brookings Institute Global Views* 4 (2016).
23. Chung, Min Gon, Anna Herzberger, Kenneth A. Frank, and Jianguo Liu. "International Tourism Dynamics in a Globalized World: A Social Network Analysis Approach." *Journal of Travel Research* 59, no. 3 (May 16, 2019): 387-403. <https://doi.org/10.1177/0047287519844834>.
24. Chuwiruch, Natnicha. "Elite Thai Visa Program Aims to Lure Expats Seeking Virus Haven." Bloomberg.com, August 14, 2020. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-14/elite-thai-visa-program-aims-to-lure-expats-seeking-virus-haven>.
25. Cohen, Erik. "Globalization, global crises and tourism." *Tourism recreation research* 37, no. 2 (2012): 103-111.

26. Council of the European Union. "Council Recommendation (EU) 2020/1144 of 30 July 2020 Amending Recommendation (EU) 2020/912 on the Temporary Restriction on Non-Essential Travel into the EU and the Possible Lifting of Such Restriction ST/9978/2020/INIT." *EUR-Lex*, 30 July 2020, eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.248.01.0026.01.ENG&toc=OJ:L:2020:248:TOC#ntr.
27. De Lima, P., S. Bernabè, R. L. Bubbico, S. Leonardo, and C. Weiss. "Migration and the EU: Challenges, opportunities, the role of EIB." European Investment Bank (2016). Hal 9
28. Debinski, Gabrielle, and Gabriella Turrisi. "The Graphic Truth: Who Depends the Most on Tourists?" GZERO Media, May 14, 2020. <https://www.gzeromedia.com/the-graphic-truth-who-depends-the-most-on-tourists>.
29. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI. Siaran Pers Menkumham Terbitkan Larangan Sementara Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Terkait Covid-19. 31 Mar 2020,
30. Elfira, Rizka. "Malaysia-Singapura Bikin Travel Bubble, Tak Ajak Indonesia?" *detikTravel*, July 13, 2020. <https://travel.detik.com/travel-news/d-5091886/malaysia-singapura-bikin-travel-bubble-tak-ajak-indonesia>.
31. Elliott, Anthony, and John Urry. *Mobile lives*. Routledge, 2010.
32. Embassy of the People's Republic of China in the Kingdom of Denmark. *关于为持中国有效居留许可的相关外国人提供签证便利的通知 (Pemberitahuan Tentang Penyediaan Fasilitas Visa Bagi Orang Asing Yang Memegang Izin Tinggal Yang Sah Di Tiongkok)*. 10 Aug. 2020, dk.chineseembassy.org/chn/lsw/t1805270.htm.
33. Embassy of the People's Republic of China in the Republic of Singapore. *FAQS ON THE CHINA-SINGAPORE FAST LANE*. 14 June 2020, www.chinaembassy.org.sg/eng/lsw/fhqz/t1788677.htm.
34. England, Andrew, and Amiko Terazono. "Pandemic Revives Gulf Fears over Food Security." *Financial Times*, August 5, 2020. <https://www.ft.com/content/5ff72ce2-5947-497e-ac83-4aa4d008a73d>.Aboud,
35. Erviani, Ni Komang. "Bali Postpones Plans to Welcome International Travelers in September." *The Jakarta Post*, August 24, 2020. <https://www.thejakartapost.com/travel/2020/08/24/bali-postpones-plans-to-welcome-international-travelers-in-september.html>.
36. Euromonitor Travel Model. Baseline Macro Model, 2020. May 2020, analytics-dashboards.euromonitor.com/Consulting/Production/Content/MacroIndicatorsModel/Content/MacroScenarioPdf/C19-Baseline.pdf. Passport.
37. Euromonitor Travel Model. Coronavirus (COVID-19): Understanding the Impact. Mei 2020, www.portal.euromonitor.com/portal/dashboard/index. Passport.

38. Euromonitor Travel Model. Pre-C19 Forecasts Macro Model, 2020. May 2020, <https://analytics-dashboards.euromonitor.com/Consulting/Production/Content/MacroIndicatorsModel/Content/MacroScenarioPdf/Pre-C19-Forecasts.pdf>. Passport.
39. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). “Geographical Distribution of 2019-NCov Cases Globally.” European Centre for Disease Prevention and Control, 20 Agustus 2020, www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases.
40. Fachriansyah, Rizky. “Indonesia to Establish Travel Corridor for ‘Essential Business Trips’ with South Korea.” The Jakarta Post, 13 Aug. 2020, www.thejakartapost.com/news/2020/08/13/indonesia-to-establish-travel-corridor-for-essential-business-trips-with-south-korea.html.
41. Foreign and Commonwealth Office. “Coronavirus (COVID-19): Countries and Territories Exempt from Advice against ‘All but Essential’ International Travel.” *GOV.UK*, 6 Aug. 2020, www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-countries-and-territories-exempt-from-advice-against-all-but-essential-international-travel.
42. Foreign and Commonwealth Office. “Foreign Travel Advice.” *GOV.UK*, 2020, www.gov.uk/foreign-travel-advice. Diakses pada 11 Aug. 2020.
43. Foreign and Commonwealth Office. “Indonesia Travel Advice.” *GOV.UK*, July 30, 2020. <https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/indonesia>.
44. FT Editorial Board. “Travel ‘Bubbles’ Offer a Potential Way Forward.” *Financial Times*, 11 May 2020, www.ft.com/content/d82a57d4-9086-11ea-9b25-c36e3584cda8.
45. FT Reporters. “Taiwan Says WHO Failed to Act on Coronavirus Transmission Warning.” www.ft.com, March 20, 2020. <https://www.ft.com/content/2a70a02a-644a-11ea-a6cd-df28cc3c6a68>.
46. Fu, Helei. “Clarification of Entry Measures for Foreign Employees into Shanghai During the Travel Ban (Normal and Fast Track Channels).” *European Union Chamber of Commerce in China*, 23 May 2020, www.europeanchamber.com.cn/en/national-news/3224/clarification_of_entry_measures_for_foreign_employees_into_shanghai_during_the_travel_ban_normal_and_fast_track_channels_.
47. Gallagher, James. “‘Jaw-Dropping’ World Fertility Rate Crash Expected.” BBC News, July 15, 2020, sec. Health. <https://www.bbc.com/news/health-53409521>.
48. Global Web Index. “GWI Coronavirus Research | Maret 2020 Series 2: Travel & Commuting,” Maret 2020. [https://www.globalwebindex.com/hubfs/1.%20Coronavirus%20research%20assets/GWI%20coronavirus%20findings%20Maret%202020%20-%20Travel%20\(Release%20\).pdf](https://www.globalwebindex.com/hubfs/1.%20Coronavirus%20research%20assets/GWI%20coronavirus%20findings%20Maret%202020%20-%20Travel%20(Release%20).pdf).

49. Gulley, Aaron. "New Zealand Has 'Effectively Eliminated' Coronavirus. Here's What They Did Right." *Travel*, April 30, 2020. <https://www.nationalgeographic.com/travel/2020/04/what-new-zealand-did-right-in-battling-coronavirus/>.
50. Hancock, Alice. "Britons Shun Foreign Travel for Holidays at Home." *Financial Times*, Juli 2, 2020. <https://www.ft.com/content/efcb225a-3c5c-4295-b173-22c1f600e110>.
51. Handfield, Robert B., and Ernest L. Nichols. "Key Issues in Global Supply Base Management." *Industrial Marketing Management* 33, no. 1 (January 2004): 29–35. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2003.08.007>.
52. Handong, Li, Nguyen Hongngoc, and Zhou Tianmin. "Vietnam's Population Projections and Aging Trends from 2010 to 2049." *Journal of Population Ageing* (2020): 1-18.
53. Handong, Li, Nguyen Hongngoc, and Zhou Tianmin. "Vietnam's Population Projections and Aging Trends from 2010 to 2049." *Journal of Population Ageing* (2020): 1-18.
54. HBO. "Game of Thrones - Littlefinger 'Chaos Is a Ladder.'" YouTube, 6 May 2013, www.youtube.com/watch?v=PxlIraEV8n4&feature=emb_title.
55. He, Yafei. "After the Pandemic: More or Less Anarchy?" *China-US Focus*, June 10, 2020. <https://www.chinausfocus.com/foreign-policy/after-the-pandemic-more-or-less-anarchy>.
56. Hollinger, Peggy, Robert Wright, and Michael Pooler. "Shipping Industry Warns of Trade Logjam as Crews Remain Stranded." *Financial Times*, June 7, 2020. <https://www.ft.com/content/4f2e33a6-e1f7-407f-b2af-8aac31e0d8ee>.
57. Hovhannisyan, Nune, and Wolfgang Keller. "International business travel: an engine of innovation?." *Journal of Economic Growth* 20, no. 1 (2015): 75-104.
58. <https://www.imigrasi.go.id/uploads/12-12-56>
Pers_Rilis_PERMENKUMHAM_NO__8_TAHUN_2020.pdf
59. IISD Knowledge Hub. "NATO: Climate Change Poses Significant Threat Multipliers," October 13, 2015. <https://sdg.iisd.org/news/nato-climate-change-poses-significant-threat-multipliers/>.
60. Institute for Economics & Peace. "Global Terrorism Index 2019 Measuring the Impact of Terrorism." Sydney, 2019. <http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/11/GTI-2019web.pdf>.
61. International Monetary Fund. "Vietnam's Success in Containing COVID-19 Offers Roadmap for Other Developing Countries." IMF, June 29, 2020. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/29/na062920-vietnams-success-in-containing-covid19-offers-roadmap-for-other-developing-countries>.
62. International Monetary Fund. "Vietnam's Success in Containing COVID-19 Offers Roadmap for Other Developing Countries." IMF, Juni 29, 2020. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/29/na062920-vietnams-success-in-containing-covid19-offers-roadmap-for-other-developing-countries>.

63. IPP World. "Recovering China: Who Is Travelling Where After COVID-19." Hotel News Resource, June 25, 2020. <https://www.hotelnewsresource.com/article111256.html>.
64. Japan National Tourism Organization. "Coronavirus (COVID-19) Advisory Information." August 22, 2020. <https://www.japan.travel/en/coronavirus/>.
65. Jing, Li Hua, et al. "Select Foreign Nationals Are Green-Lighted for Fast-Track Channels to Return to China for Work Purposes: Koreans, Japanese, Singaporeans, Germans, French, British, Swiss and Italians Are Now Eligible." *The Square*, Horizons Corporate Advisory, 5 June 2020, www.thesquare.blog/2020/06/05/select-foreign-nationals-are-green-lighted-for-fast-track-channels-to-return-to-china-for-work-purposes-koreans-japanese-singaporeans-germans-french-british-swiss-and-italians-are-now-eligible/.
66. Jordan, Alex. "Coronavirus Travel Bubbles Explained." *Skyscanner*, 17 June 2020, www.skyscanner.com.sg/news/coronavirus-travel-bubbles-explained#what.
67. Kato, Yuichi Miyahara, Paul Cherrone, Mayu. "Japan – Phased Resumption of Cross-Border Travel with Thailand and Vietnam - KPMG Global." KPMG, Agustus 6, 2020. <https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/08/flash-alert-2020-341.html>.
68. Kato, Yuichi Miyahara, Paul Cherrone, Mayu. "Japan – Phased Resumption of Cross-Border Travel with Thailand and Vietnam - KPMG Global." KPMG, Agustus 6, 2020. <https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/08/flash-alert-2020-341.html>.
69. Kean, Thomas H., Lee H. Hamilton, Richard Ben-Veniste, Bob Kerrey, Fredd F. Fielding, John F. Lehman, Jamie S. Gorelick, et al. "The 9/11 Commission Report." Washington: National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, July 22, 2004. <https://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf>.
70. Khor, Swee Kheng. "Coronavirus 'Travel Bubbles' Must Be Rooted in Science, Not Politics." *South China Morning Post*, 7 July 2020, www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3092045/coronavirus-travel-bubbles-must-be-rooted-science-not-politics.
71. Kilpatrick, Jim, and Lee Barter. "COVID-19: Managing Supply Chain Risk and Disruption." Deloitte.ca, 2020. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/finance/Supply-Chain_POV_EN_FINAL-AODA.pdf.
72. Kurian, George Thomas. "S." Dalam *The AMA Dictionary of Business and Management*, 243-66. New York; Atlanta; Brussels; Chicago; Mexico City; San Francisco; Shanghai; Tokyo; Toronto; Washington, D.C.: AMACOM Division of American Management Association International, 2013. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1d2dpr2.20>.
73. Leila, and Michael Peel. "Covid-19 Hastens French Push to Bring Home Medicines Manufacture." *Financial Times*, Juli 29, 2020. <https://www.ft.com/content/80a4836b-ca25-48e0-996d-458186e968dc>.

74. Lembong, Thomas. Indonesia Investment Landscape: Progress and Outlook Trade, Tourism, Investment Seminar on TEI. 17 Okt. 2019, http://www.tradexpoindonesia.com/programme/download-presentation/pdf/tti_seminar/TTI-Seminar-TEI2019-BKPM.pdf
75. Ligorner, K Lesli, and Shannon A. Donnelly. "Potential Routes for US Employees to Enter China for Work Purposes." *Morgan Lewis*, 10 July 2020, www.morganlewis.com/pubs/potential-routes-for-us-employees-to-enter-china-for-work-purposes-cv19-1f.
76. Liu, Anyu, and Bob McKercher. "The Impact of Visa Liberalization on Tourist Behaviors—The Case of China Outbound Market Visiting Hong Kong." *Journal of Travel Research* 55, no. 5 (December 29, 2014): 603–11. <https://doi.org/10.1177/0047287514564599>.
77. Liu, Yen-Chin, et al. "COVID-19: The First Documented Coronavirus Pandemic in History." *Biomedical Journal*, Mei 2020, doi:10.1016/j.bj.2020.04.007.
78. Lo, Bobo. "Global Order in the Shadow of the Coronavirus: China, Russia and the West." www.lowyinstitute.org, July 29, 2020. <https://www.lowyinstitute.org/publications/global-order-shadow-coronavirus-china-russia-and-west>.
79. Loasana, Nina. "Indonesia Officially Sets up Essential Business 'Travel Corridor' with UAE." *The Jakarta Post*, 31 July 2020, www.thejakartapost.com/news/2020/07/31/indonesia-officially-sets-up-essential-business-travel-corridor-with-uae.html.
80. Madhavan, Ravi, and Akie Iriyama. "Understanding Global Flows of Venture Capital: Human Networks as the 'Carrier Wave' of Globalization." *Journal of International Business Studies* 40, no. 8 (2009): 1241–1259. <https://www.jstor.org/stable/27752445>.
81. Mau, Steffen, Fabian Gülzau, Lena Laube, and Natascha Zaun. "The Global Mobility Divide: How Visa Policies Have Evolved over Time." *Journal of Ethnic and Migration Studies* 41, no. 8 (February 9, 2015): 1192–1213. <https://doi.org/10.1080/1369183x.2015.1005007>.
82. Menon, Vanu Gopala. "Usaha Kolektif Singapura, Malaysia Capai Hasil Positif." *BH Online*, 10 Aug. 2020, www.bharian.com.my/kolumnis/2020/08/719628/usaha-kolektif-singapura-malaysia-capai-hasil-positif.
83. Millar, Jane, and John Salt. "In whose interests? IT migration in an interconnected world economy." *Population, Space and Place* 13, no. 1 (2007): 41-58.
84. Ministry of Foreign Affairs of Japan. 新型コロナウイルスの感染拡大を受けての出国制限措置や航空便の運休による出国困難（新規）(Pembatasan keberangkatan akibat penyebaran infeksi virus corona baru dan kesulitan keberangkatan akibat penangguhan penerbangan (baru)). 25 Mar. 2020, www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0325.html.

85. Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea . *ROK's Essential Economic Personnel, Including Business People, to Be Allowed into Indonesia*. 13 Aug. 2020, www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=321187
86. Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea. *Fast Track Procedure Available for Applicable Koreans Entering China for Business Purpose*. 1 May 2020, www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=321072.
87. Ministry of Foreign Affairs Singapore, and Ministry of Trade and Industry Singapore. *Joint Press Statement by Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Trade and Industry on the Singapore-China Fast Lane for Essential Travel*. 3 Juni 2020, www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2020/06/20200603-SG-CHINA-Fast-Lane-Essential-Travel.
88. Ministry of Foreign Affairs, Republic of Singapore, and Ministry of Foreign Affairs, Malaysia. *Joint Press Statement by H.E. Dr. Vivian Balakrishnan, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Singapore and YB Dato' Seri Hishammuddin Tun Hussein, Minister of Foreign Affairs of Malaysia*. 26 July 2020, www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2020/07/20200726-Joint-Press-Statement-Causeway-Meeting.
89. Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China. *China and Cambodia Hold the Fifth Meeting of Intergovernmental Coordination Committee*. 16 June 2020, www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1789723.shtml.
90. Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China. *Foreign Ministry Spokesperson Geng Shuang's Regular Press Conference on April 30, 2020*. 30 Apr. 2020, www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1775332.shtml.
91. Ministry of Health Republic of Singapore. *MOH | Updates on COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) Local Situation*. 2020, www.moh.gov.sg/covid-19.
92. Miroff, Nick, and Tomy Romm. "Trump, Citing Pandemic, Orders Limits on Foreign Workers, Extends Immigration Restrictions through December." *Washington Post*, June 23, 2020. https://www.washingtonpost.com/immigration/trump-immigration-workers-coronavirus/2020/06/22/3b969e88-b489-11ea-9b0f-c797548c1154_story.html.
93. New China TV. "Once upon a Virus..." Video Youtube. *YouTube*, April 29, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=Q5BZ09iNdvo&feature=emb_logo.
94. Nguyen, Malle. "Why Japan Put Forth Business Travel with Vietnam, Thailand Instead of US and China?" *Vietnam Times*, June 22, 2020. <https://vietnamtimes.org.vn/why-japan-put-forth-business-travel-with-vietnam-thailand-instead-of-us-and-china-21583.html>.
95. Parker, George, and Alice Hancock. "UK Considers Adding France to Covid-19 Quarantine List." *www.ft.com*, August 12, 2020. <https://www.ft.com/content/db9b331e-869c-465e-9962-ea207ecf7c4f>.

96. Perserikatan Bangsa-Bangsa. DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA. Terjemah oleh Komnas HAM RI, www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--.
97. Perserikatan Bangsa-Bangsa. *International Covenant on Civil and Political Rights*. United Nations Treaty Collection, 19 Dec. 1966.
98. Pickard, Jim, and Tanya Powley. "Plan for Travel Corridors with Europe to be given Priority." *Financial Times*, 24 June 2020, www.ft.com/content/a69af2c2-5b0c-4354-be6c-74fa0acab4a9.
99. Plender, R. ed., 1988. *International migration law* (Vol. 2). Martinus Nijhoff Publishers.
100. Pollack, Todd, Guy Thwaites, Maia Rabaa, Marc Choisy, Rogier van Doorn, Duong Huy Luong, Dang Quang Tan, et al. "Emerging COVID-19 Success Story: Vietnam's Commitment to Containment." *Our World in Data*, June 30, 2020. <https://ourworldindata.org/covid-exemplar-vietnam>.
101. Pollitzer, R., S. Swaroop, and W. Burrows. "World Health Organization Monogram Series No. 43 Cholera." Geneva: World Health Organization, 1959. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/41711/WHO_MONO_43;jsessionid=BB8912DEEC302805891847EE2B6B7C74?sequence=1.
102. Quah, Danny. "Great Power Competition in the Marketplace for World Order (Draft)," November 14, 2019. <http://www.dannyquah.com/Quilled/Output/Quah-D-2019-Great-Power-Competition-Marketplace-World-Order.pdf>.
103. Rachman, Gideon. "Coronavirus Could Kill off Populism." *www.ft.com*, Juni 29, 2020. <https://www.ft.com/content/3bcf2b5e-e5f1-48e4-bb15-cd29615a9198>.
104. Rausch, Thomas. "What If the Covid19 World Is What States Make of It?" GED-Project, April 16, 2020. <https://ged-project.de/globalization/what-if-the-covid19-world-is-what-states-make-of-it/>.
105. Reale, E. and Mirkine-Guetzévitch, B., 1930. *Le Régime des passeports et la Société des Nations*. Librairie Arthur Rousseau, Rousseau et Cie.
106. Reuters, Agence France-Presse. "No Zero Risk Strategy for Renewed Travel during Covid-19 Pandemic, Warns WHO." *The Straits Times*, 1 Aug. 2020, www.straitstimes.com/world/europe/no-zero-risk-strategy-for-renewed-travel-warns-who.
107. Reuters. "Chinese Tourists Return to South Korea as Tensions Ease." *South China Morning Post*, May 2, 2018. <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2144327/chinese-tourists-returning-south-korea-after-missile>.
108. Reuters. "Tourism-Reliant Thailand Shelves 'Travel Bubble' as Virus Cases Rise." *The Japan Times*, 6 Aug. 2020, www.japantimes.co.jp/news/2020/08/06/asia-pacific/thailand-shelves-travel-bubble/.

109. Reuters. "Trump Says China Could Have Stopped Coronavirus, Beijing Decries Shifting of Blame." *The Jakarta Post*, April 28, 2020. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/28/trump-says-china-could-have-stopped-coronavirus-beijing-decries-shifting-of-blame.html>.
110. Richter, Konstantin. "How New Zealand Beat the Coronavirus." *POLITICO*, May 14, 2020. <https://www.politico.eu/article/kiwis-vs-coronavirus-new-zealand-covid19-restrictions-rules/>.
111. Riley, K. Jack. "Flight of Fancy?: Air Passenger Security Since 9/11." Di *The Long Shadow of 9/11: America's Response to Terrorism*, Diedit oleh Jenkins Brian Michael and Godges John Paul, by Dobbins James, Muñoz Arturo, Jones Seth G., Wehrey Frederic, Rabasa Angel, Larson Eric V., Paul Christopher, Cragin Kim, Helmus Todd C., Jackson Brian A., Treverton Gregory F., Ringel Jeanne S., Wasserman Jeffrey, Dixon Lloyd, Kipperman Fred, and Reville Robert T., 147-60. Santa Monica; Arlington; Pittsburgh: RAND Corporation, 2011.
112. Robbins, Tom. "Shortcuts: Surge in Solo and off-Grid Holidays, While Ski Companies Suffer." *Financial Times*, August 21, 2020. <https://www.ft.com/content/9b6b9a77-7a35-4f12-aea2-a635bc8aafb7>.
113. Ruzzier, Mitja, Robert D. Hisrich, and Bostjan Antoncic. "SME Internationalization Research: Past, Present, and Future." *Journal of Small Business and Enterprise Development* 13, no. 4 (2006): 476-497. doi:<http://dx.doi.org.libproxy.ucl.ac.uk/10.1108/14626000610705705>. <https://search-proquest-com.libproxy.ucl.ac.uk/docview/219290516?accountid=14511>.
114. Sampson, Anthony. *Empire of the Sky*. A&C Black, 2012.
115. Saxenian, AnnaLee. "Transnational communities and the evolution of global production networks: the cases of Taiwan, China and India." *Industry and innovation* 9, no. 3 (2002): 183-202.
116. Schmidt, Michael S., and Eric Lichtblau. "Racial Profiling Rife at Airport, U.S. Officers Say." *The New York Times*, August 11, 2012, sec. U.S. https://www.nytimes.com/2012/08/12/us/racial-profiling-at-boston-airport-officials-say.html?pagewanted=2&_r=1&hp.
117. Schmitt, Eric. "Defeated in Syria, ISIS Fighters Held in Camps Still Pose a Threat." *The New York Times*, January 24, 2018, sec. World. <https://www.nytimes.com/2018/01/24/world/middleeast/isis-syria-militants-kurds.html>.
118. Septiari, Dian. "Doubts Loom over Indonesia's 'travel Bubble' Plan." *The Jakarta Post*, June 18, 2020. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/17/doubts-loom-over-indonesias-travel-bubble-aim.html>.

119. Septiari, Dian. "Doubts Loom over Indonesia's 'travel bubble' plan." *The Jakarta Post*, 18 June 2020, www.thejakartapost.com/news/2020/06/17/doubts-loom-over-indonesias-travel-bubble-aim.html.
120. Septiari, Dian. "Doubts Loom over Indonesia's 'travel Bubble' Plan." *The Jakarta Post*, June 18, 2020. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/17/doubts-loom-over-indonesias-travel-bubble-aim.html>.
121. Simon, Frank, and Andreas Buerger. "'Business Is Restarting': German Executives Fly Back to China." *Reuters*, 29 May 2020, www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-china/business-is-restarting-german-executives-fly-back-to-china-idUSKBN2352TF.
122. Snapshots of globalization's first wave. Dari New York Times Company [database online]. New York, 2014. https://search-proquestcom.libproxy.ucl.ac.uk/docview/2213902210?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprim
123. Somin, Ilya. "The Danger of America's Coronavirus Immigration Bans." *The Atlantic*, June 28, 2020. <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/06/danger-americas-coronavirus-immigration-bans/613537/>.
124. Spadaro, Alessandra. "COVID-19: TESTING THE LIMITS OF HUMAN RIGHTS." *European Journal of Risk Regulation*, 7 Apr. 2020, pp. 1–7, 10.1017/err.2020.27. Accessed 14 Apr. 2020.
125. Stanley, Jay. "SPOT Off." *American Civil Liberties Union*, Juni 13, 2013. <https://www.aclu.org/blog/national-security/discriminatory-profiling/spot>.
126. Stringer, Kevin. "Visa Diplomacy." *Diplomacy & Statecraft* 15, no. 4 (December 2004): 655–82. <https://doi.org/10.1080/09592290490886775>.
127. Sukarno. "MEMBANGUN DUNIA KEMBALI (TO BUILD THE WORLD A NEW)." In-Person. Dibacakan saat Sidang Umum PBB ke-XV, September 30, 1960. https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/uploaded_files/pdf/speech/normal/soekarno12.pdf.
128. Taleb, Nassim Nicholas. *The Black Swan : The Impact of the Highly Improbable*. New York, Random House, 2007.
129. Tan, Audrey. "Measures for Cross-Border Travel between Singapore and Malaysia Include Minimum 7-Day Stay-Home Notice." *The Straits Times*, 1 Aug. 2020, www.straitstimes.com/singapore/coronavirus-travel-between-spore-and-malaysia-for-business-or-official-purposes-allowed.
130. Tanaka, Miya. "Taiwan Comes to Fore as Trump Toughens China Stance Ahead of Election." *The Japan Times*, August 10, 2020. <https://www.japantimes.co.jp/news/2020/08/10/asia-pacific/taiwan-donald-trump-china-election/>.

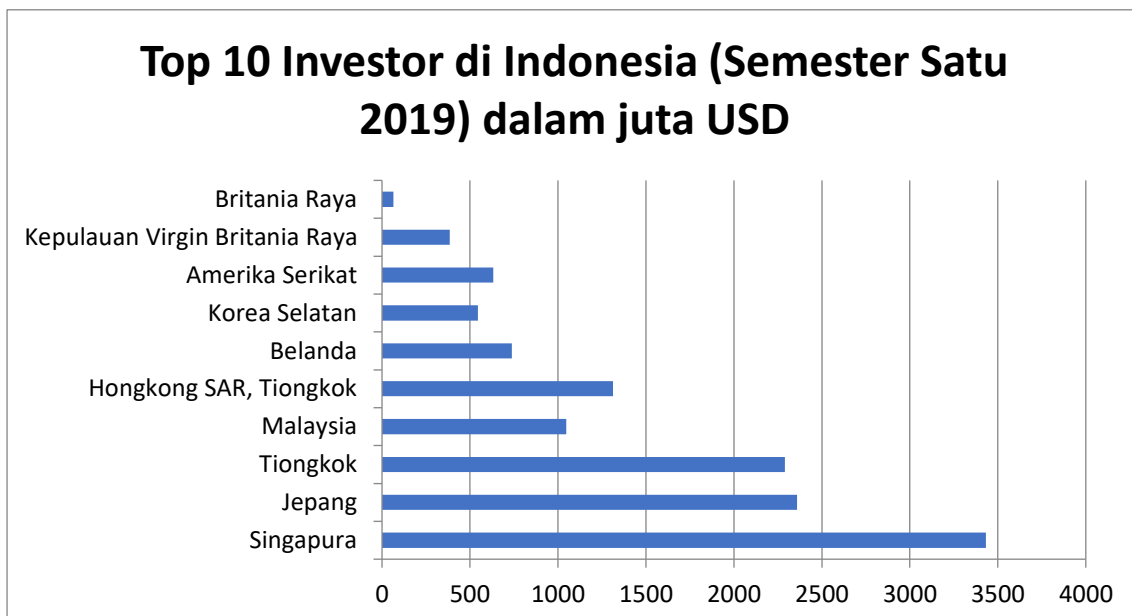
131. Tasker, Peter. "The New Geopolitics of Travel Bubbles." *Nikkei Asian Review*, 8 July 2020, asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Tea-Leaves/The-new-geopolitics-of-travel-bubbles.
132. The Government of the Hongkong Special Administrative Region. *Points to Note for Quarantine for Inbound Travellers*. 2020, www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html. Diakses pada 13 Aug. 2020.
133. The Jakarta Post News Desk. "12 Countries Issue Travel Advisories Following Terrorist Attacks." *The Jakarta Post*, Mei 16, 2018. <https://www.thejakartapost.com/travel/2018/05/16/12-countries-issue-travel-advisories-following-terrorist-attacks.html>.
134. The World Bank Group. "Foreign Direct Investment, Net Inflows (% of GDP) | Data." World Bank Data, 2019. <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS>.
135. The World Bank Group. "Foreign Direct Investment, Net Inflows (BoP, Current US\$) | Data." The World Bank Data, 2019. <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD>.
136. The World Bank Group. "Foreign Direct Investment, Net Inflows (BoP, Current US\$) - Indonesia | Data." World Bank Data, 2019. <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=ID>.
137. The World Bank Group. "GDP (Constant 2010 US\$) - Indonesia | Data." The World Bank Data, 2020. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=ID>.
138. The World Bank Group. "International Tourism, Number of Arrivals - Indonesia | Data." World Bank Data, 2019. <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?locations=ID>.
139. The World Bank Group. "International Tourism, Number of Arrivals | Data." World Bank Data, 2017. <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL>.
140. The World Bank. "Brazil Faces the Challenge of Ensuring the Country's Development as Its Population Ages." World Bank, April 6, 2011. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2011/04/06/brazil-faces-challenge-ensuring-countrys-development-population-ages>.
141. ThePrint. "Off The Cuff with Thomas Friedman." Video Youtube. *YouTube*, Mei 11, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=KkwRieeP9gE>.
142. Thu, Huong Le. "Vietnam: A Successful Battle Against the Virus." Council on Foreign Relations, April 30, 2020. <https://www.cfr.org/blog/vietnam-successful-battle-against-virus>.
143. Torpey, J. C. (2018) *The Invention of the Passport: Surveillance, Citizenship and the State*. 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Studies in Law and Society). doi: 10.1017/9781108664271.

144. Towhie, Margo, Jason Clenfield, and Hannah Dormido. "Thailand Has a Developing Economy and a Big First World Problem." Bloomberg.com, 2019. <https://www.bloomberg.com/graphics/2019-thailand-baby-bust/>.
145. Towhie, Margo, Jason Clenfield, and Hannah Dormido. "Thailand Has a Developing Economy and a Big First World Problem." Bloomberg.com, 2019. <https://www.bloomberg.com/graphics/2019-thailand-baby-bust/>.
146. Tsuji, Takashi, and Kazuhiro Furuyama. "Japan Preps First Subsidy to Company Moving Production out of China." Nikkei Asian Review, April 21, 2020. <https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/Japan-preps-first-subsidy-to-company-moving-production-out-of-China>.
147. Valentina, Jessicha. "Malaysia Reopens Borders Partially to Medical Travelers." *Travel Guide by the Jakarta Post*, 21 July 2020, www.thejakartapost.com/travel/2020/07/21/malaysia-reopens-borders-partially-to-medical-travelers.html.
148. Vollset, Stein Emil, Emily Goren, Chun-Wei Yuan, Jackie Cao, Amanda E. Smith, Thomas Hsiao, Catherine Bisignano et al. "Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study." *The Lancet* (2020).
149. Wei, Toh Ting. "Regional 'travel Bubbles' Likely in Time, Says Lawrence Wong." *The Straits Times*, 2 June 2020, www.straitstimes.com/singapore/health/regional-travel-bubbles-likely-in-time-says-lawrence-wong.
150. Wiendieck, Sebastian, and Peter Stark. "Specific Entry Possibilities during Entry Ban to China." *Rödl & Partner*, 10 June 2020, www.roedl.com/insights/covid-19/corona-china-specific-entry-possibilities-during-entry-ban.
151. Williams, Aime. "US Lawmakers Push to Reclaim Medical Supply Chains from China." *Financial Times*, April 2, 2020. <https://www.ft.com/content/d71c01db-5333-470b-abcd-0df126864447>.
152. Woo, Ryan, and Lusha Zhang. "China Will Continue Pushing for 'fast-Track' Entry Arrangement with Other Countries." *Reuters*, 7 June 2020, www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-fasttrack/china-will-continue-pushing-for-fast-track-entry-arrangement-with-other-countries-idUSKBN23E04R.
153. World Health Organization. "A checklist for pandemic influenza risk and impact management: building capacity for pandemic response." (2018).
154. World Health Organization. "Virtual Press Conference 4 May 2020," Mei 4, 2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-emergencies-coronavirus-press-conference-04may2020.pdf?sfvrsn=3ef4c516_4.

155. World Travel & Tourism Council. “Economic Impact Reports,” June 8, 2020. <https://wttc.org/Research/Economic-Impact>.
156. Yudhistira, Muhammad Halley, Yusuf Sofiyandi, Witri Indriyani, and Andhika Putra Pratama. “Heterogeneous Effects of Visa Exemption Policy on International Tourist Arrivals: Evidence from Indonesia.” *Tourism Economics*, January 10, 2020, 135481661989715. <https://doi.org/10.1177/1354816619897150>.
157. Zeihan, Peter. *Disunited Nations : The Scramble for Power in an Ungoverned World*. HarperCollins, 2020.
158. Zeihan, Peter. *The Accidental Superpower : The next Generation of American Preeminence and the Coming Global Disorder*. New York: Twelve, 2014.

Lampiran

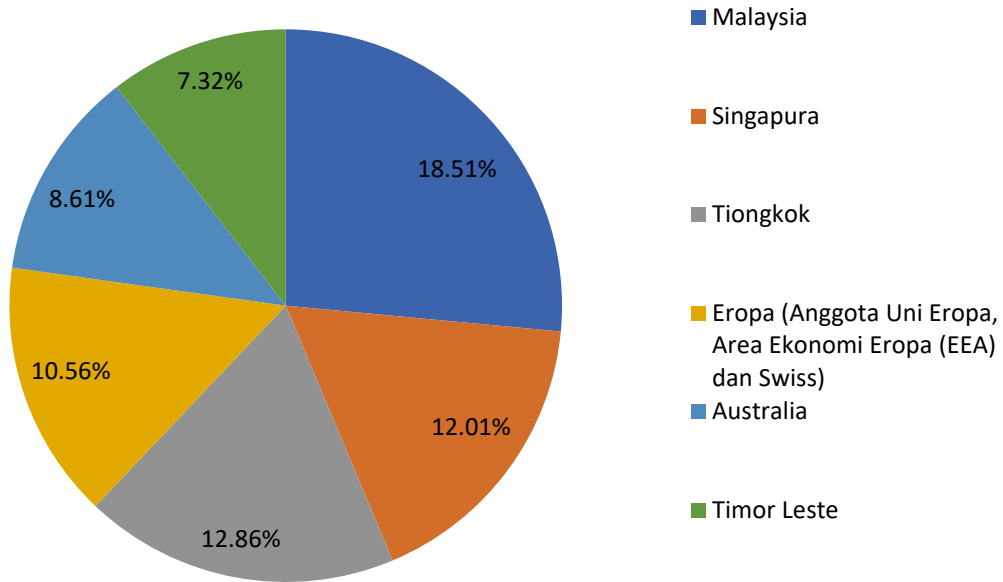
Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal RI BKPM RI, negara penyumbang investasi terbanyak adalah sebagai berikut:



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Data tidak termasuk sektor hulu migas dan sektor keuangan

Menurut data Badan Pusat Statistik RI (BPS RI), negara-negara penyumbang wisatawan asing terbanyak adalah sebagai berikut:

Kedatangan Wisatawan Mancanegara Menurut Kebangsaan 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik. Bagan ini hanya memasukkan negara atau wilayah yang kontribusinya diatas 5%, sehingga jika di total memang tidak sampai 100%